

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL  
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2015-2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :**

**YOSI APRILIYANA**  
**NIM.17.52.21.106**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
2021**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL  
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

YOSI APRILIYANA  
NIM. 17.52.21.106

Surakarta, 26 Maret 2021

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si  
NIP. 19841008 201403 2 005

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YOSI APRILIYANA  
NIM : 17.52.21.106  
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2015-2019".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 26 Maret 2021



Yosi Apriliyana

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YOSI APRILIYANA  
NIM : 175221106  
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2015-2019".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 26 Maret 2021



Yosi Apriliyana

Anim Rahmayati, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Yosi Apriliyana

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yosi Apriliyana NIM: 17.52.21.106 yang berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL  
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2015-2019.**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Maret 2021  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si  
NIP. 19841008 201403 2 005

**PENGESAHAN**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA  
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2015-2019**

Oleh:

**YOSI APRILIYANA**

**NIM.17.52.21.106**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 / 23 Syakban 1442 H dan dinyatakan telah  
memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dosen Penguji

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)

Ade Setiawan, M.Ak

NIP 19800712 201403 1 003



Penguji II

Wahyu Pramesti, S.E, M.Si, Ak

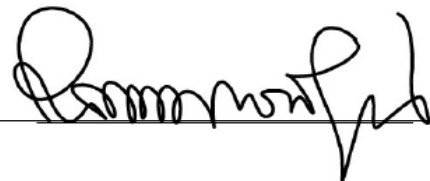
NIP 19871007 201403 2 004



Penguji III

Ronnawan Juniatmoko, S.Pd., M.Si.

NIP 1990607 201903 1 011



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si.

NIP. 19720304 200112 1 004

## **MOTTO**

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq: 4)

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

“Salah satu yang harus kita takuti yaitu ketakutan itu sendiri”

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan skripsi ini dengan segenap cinta dan do'a untuk

Alm. Bapak dan Ibu tercinta

Kakak-kakak tersayang

Yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi dan kasih sayang yang tulus  
dan tak ternilai harganya.

Terimakasih



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaiku. Wr. Wb.*

Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2015-2019”. Tugas akhir ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak dukungan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis berkeinginan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
3. Anim Rahmayati, S.E., M.Si., ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian, waktu dan bimbingan selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Indriyana Puspitosari, SE., M.Si., AK. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan kepada penulis salam

menyelesaikan studi S1 di Jurusan Akuntansi Syariah dari awal semester hingga berakhirnya masa studi penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah membantu penulis membantu kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Untuk Ibu dan Alm. Bapak saya yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa besar kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua kakak saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
9. Teman saya Sofiah, Naylul, Vio, Tanya, Rosita terimakasih sudah menjadi teman bingung saya selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2017 IAIN Surakarta.

Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah memberikan jasanya untuk penulis, hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Maret 2021

Yosi Apriliyana

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the variabel PAD, SILPA, total area, and economic growth have an affect on capital expenditure in provincial in Indonesia 2015-2019.*

*The population in this study is the provincial government in Indonesia in 2015-2019. The sampling method used was saturated sampling method so that all members of the population were sampled, So that the sample of this research is 34 provincial government in Indonesia. The analytical tool used to analyze the data is SPSS 23. The data analysis method used in this study was multiple linear regression analysis.*

*The results of this study indicate that PAD have effect on capital expenditure in the provincial government in 2015-2019. SILPA have effect on capital expenditure in the provincial government during 2015-2019. Total area affects on capital expenditure in the provincial government 2015-2019. Meanwhile, economic growth have no effect on provincial government capital expenditures for 2015-2019.*

*Keywords : PAD, SILPA, Total Area, and Economic Growth*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel yaitu 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Alat yang digunakan untuk menganalisis data yaitu SPSS 23. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi tahun 2015-2019. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi tahun 2015-2019. Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi tahun 2015-2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi tahun 2015-2019.

Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, dan Pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN ABSTRACT .....	xi
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10

1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.7 Jadwal Penelitian.....	11
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Kajian Teori .....	13
2.1.1 Agency Theory.....	13
2.1.2 Pengertian Belanja Modal .....	14
2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.4 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .....	17
2.1.5 Pengertian Luas Wilayah .....	18
2.1.6 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan .....	20
2.3 Kerangka Berfikir .....	25
2.4 Perumusan Hipotesis.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian.....	32
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel .....	32
3.3.1 Populasi.....	32

3.3.2	Sampel.....	34
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.4	Data Dan Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Variabel Penelitian .....	36
3.6.1	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variabel</i> ) .....	36
3.6.2	Variabel Bebas (Independent Variabel).....	36
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	36
3.8	Teknik Analisis Data.....	38
3.8.1	Uji Asumsi Klasik.....	38
1.	Uji Normalitas .....	38
2.	Uji Multikoleniaritas .....	38
3.	Uji Auotokorelasi .....	39
4.	Uji Heteroskedastisitas .....	40
3.8.2	Uji Ketepatan Model.....	40
1.	Uji F.....	40
2.	Uji Koefisien Determinasi.....	41
3.8.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	41
3.8.4	Uji Hipotesis .....	42
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....		43

4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	43
4.2	Pengujian Dan Hasil Analisis Data .....	48
4.2.1	Uji Asumsi Klasik .....	49
1.	Uji Normalitas .....	49
2.	Uji Multikolinearitas .....	50
3.	Uji Autokorelasi .....	51
4.	Uji Heteroskedastisitas .....	52
4.2.2	Uji Ketepatan Model .....	53
1.	Uji F.....	53
2.	Uji Koefisien Determinasi.....	53
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
4.2.4	Uji Hipotesis .....	56
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data .....	58
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	63
5.3	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....		65
LAMPIRAN.....		68



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Belanja Daerah Tingkat Provinsi .....	4
Tabel 1.2. Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi .....	5
Tabel 3.1. Populasi Penelitian .....	33
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel.....	36
Tabel 3.3. Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi .....	39
Tabel 4.1. Nama Provinsi.....	43
Tabel 4.2. Hasil Uji Durbin Watson.....	45
Tabel 4.3. Pengobatan Uji Durbin Watson .....	46
Tabel 4.4. Pengobatan Uji Durbin Watson .....	46
Tabel 4.5. Pengobatan Uji Durbin Watson .....	47
Tabel 4.6. Pengobatan Uji Durbin Watson .....	47
Tabel 4.7. Pengobatan Uji Durbin Watson .....	48
Tabel 4.8. Hasil Uji Normalitas .....	49
Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi .....	51
Tabel 4.11. Hasil Heteroskedastisitas .....	52
Tabel 4.12. Hasil Uji F.....	53
Tabel 4.13. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	54
Tabel 4.14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4.15. Hasil Uji Hipotesis .....	57

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	25
------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian .....	68
Lampiran 2: Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal 2015-2019.....	69
1. Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal 2015 .....	69
2. Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal 2016 .....	71
3. Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal 2017 .....	73
4. Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal 2018 .....	75
5. Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal 2019 .....	77
Lampiran 3: Tabel Perhitungan PAD Pemerintah Provinsi 2015-2019.....	79
1. Tabel Perhitungan PAD Pemerintah Provinsi 2015.....	79
2. Tabel Perhitungan PAD Pemerintah Provinsi 2016.....	81
3. Tabel Perhitungan PAD Pemerintah Provinsi 2017.....	83
4. Tabel Perhitungan PAD Pemerintah Provinsi 2018.....	85
5. Tabel Perhitungan PAD Pemerintah Provinsi 2019.....	87
Lampiran 4: Tabel PDRB Pemerintah Provinsi 2014-2019.....	89
1. Tabel PDRB Pemerintah Provinsi 2014-2016 .....	89
2. Tabel PDRB Pemerintah Provinsi 2017-2019 .....	91

Lampiran 5: Hasil Output SPSS 23.....	93
1. Uji Normalitas.....	93
2. Uji Multikolinearitas .....	94
3. Uji Autokorelasi.....	94
4. Uji Heteroskedastisitas.....	95
5. Uji F .....	96
6. Uji Koefisien Determinasi .....	96
7. Uji T .....	97
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.....	98
Lampiran 7: Bukti Cek Plagiarisme .....	99

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi Daerah. Otonomi daerah mulai berlaku di pemerintahan sejak 2001, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia (Sari, Kepramareni, dan Novitasari, 2017). Selain untuk memperkuat perekonomian, otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Syukri dan Hinaya, 2019).

Salah satu bentuk otonomi daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah belanja daerah (Rahmadewi, 2018). Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2020 belanja daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Diantara keempat klasifikasi biaya tersebut, belanja modal memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana umum (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020). Belanja modal itu sendiri merupakan dana untuk pembelian atau pemeliharaan asset tetap berwujud atau asset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Permendagri No. 64 Tahun 2020).

Menurut UU No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah dana yang didapat dari kelebihan taksiran pendapatan serta realisasi belanja pada satu periode, nilai SiLPA yang ideal diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah (Maulana, Masitoh, dan Dewi, 2020).

Luas wilayah merupakan kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administratif dan fungsional. Luasnya suatu daerah dapat mempengaruhi belanja modal yang diukur dalam satuan  $KM^2$  (Wibisono dan Wildaniati, 2016). Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan produksi barang dan jasa suatu daerah pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB atau PDRB atas dasar harga konstan (Badan Pusat Statistika).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dana yang memiliki dampak besar dalam pemerintah daerah, karena jika suatu daerah memiliki pendapatan yang tinggi, maka daerah tersebut mampu meningkatkan pembiayaan belanja modalnya (Mahmudi, 2006; Kasdy, Nardisyah, dan Fahlevi, 2018). Menurut Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017) selain PAD, SiLPA juga tergolong dalam sumber pendanaan belanja modal. Karena SiLPA merupakan dana yang didapat dari kelebihan nilai taksiran antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan APBD dalam satu periode pelaporan (PP No. 12 Tahun 2019).

Daerah dengan wilayah yang luas memerlukan kebutuhan untuk melayani masyarakat lebih banyak, jika membandingkannya dengan wilayah yang tidak begitu luas (Maulana, Masitoh, dan Dewi, 2020). Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan pembangunan

ekonomi serta mengelola sumber daya yang ada untuk membuat sebuah bidang atau kegiatan usaha baru, dan diharapkan dapat berdampak pada berkembangnya aktivitas usaha di wilayah regional (Suratno, 2010; Sari, Kepramareni, dan Novitasari, 2017).

Pada penelitian Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan luas wilayah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Dan hasil dari riset Wibisono dan Wildaniati (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Pada penelitian Ayem dan Pratama (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dimana dari riset tersebut memperoleh hasil yang sama penelitian Malau dan Pulungan (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh pada belanja modal.

Riset terdahulu yang meneliti mengenai belanja modal memperoleh hasil yang berbeda-beda. Diantaranya adalah pada penelitian Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pada penelitian Nurlis (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dan penelitian Wibisono, dan Wildaniati (2016) memiliki hasil yang sama terkait pengaruh SiLPA terhadap belanja modal bahwa SiLPA berpengaruh terhadap

belanja modal. Namun pada penelitian Talluta, Lambelanova, dan Wargadinata (2018) menunjukkan bahwa SiLPA tidak mempengaruhi belanja modal.

Penelitian Wibisono dan Wildaniati (2016) menyebutkan bahwa luas wilayah dapat mempengaruhi belanja modal. Penelitian Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) memiliki hasil yang sama dengan penelitian Wibisono Dan Wildaniati (2016). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara (2019) menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Malau dan Pulungan (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Namun penelitian Syukri dan Hinaya (2019) memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian Malau dan Pulungan (2019) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh pada belanja modal.

Tabel 1.1  
Belanja Daerah Tingkat Provinsi

Uraian	Provinsi			
	2017		2018	
	Rp	%	Rp	%
Total belanja	329,1 T	100	349,6 T	100
1 Belanja pegawai	87,1 T	26,5	90,6 T	25,9
2 Belanja Barang dan Jasa	68,4 T	20,8	78,8 T	22,5
3 Belanja Modal	55,4 T	16,8	59,4 T	17
4 Belanja Lainnya	118,3 T	35,9	120,9 T	34,6

Sumber : DJPK, Ringkasan APBD 2018

Pada tabel diatas terlihat bahwa belanja modal pada pemerintahan provinsi merupakan komponen paling kecil pada belanja daerah. Pada tahun 2018 belanja modal hanya 17 % dari belanja daerah, dimana jumlah tersebut jauh lebih kecil



dibandingkan dengan belanja lainnya yang merupakan komponen belanja daerah paling besar yaitu 34,6 %, atau pada belanja pegawai yang menempati urutan kedua sebanyak 25,9 % dari belanja modal.

Padahal diantara beberapa klasifikasi dari belanja daerah , belanja modal memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana umum (Maulana, Masitoh, dan Dewi, 2020). Karena pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan ataupun perbaikan untuk sarana dan prasaran umum yang berkaitan langsung pada usaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut Darwanto dan Sari (2007) dalam Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) menyatakan bahwa penerimaan yang berasal dari pemerintah hendaknya diutamakan untuk keperluan umum atau layanan publik.

Tabel 1.2  
Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi

No.	Nama Provinsi	Tahun	
		2017	2018
1	Provinsi Aceh	17,2%	21,9%
2	Provinsi Sumatera Utara	13,7%	13,7%
3	Provinsi Sumatera Bara	15,3%	16,8%
4	Provinsi Riau	23,1%	17,3%
5	Provinsi Jambi	23,3%	22,0%
6	Provinsi Sumatera Selatan	27,0%	14,5%
7	Provinsi Bengkulu	30,2%	22,5%
8	Provinsi Lampung	18,1%	27,0%
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16,8%	14,2%
10	Provinsi Kepulauan Riau	17,3%	20,3%
11	Provinsi DKI Jakarta	25,0%	23,9%
12	Provinsi Jawa Barat	7,1%	10,7%
13	Provinsi Jawa Tengah	7,9%	7,5%

Tabel berlanjut ....

Lanjutan Tabel 1.2

14	Provinsi D,I, Yogyakarta	20,0%	21,4%
15	Provinsi Jawa Timur	9,3%	9,3%
16	Provinsi Banten	14,6%	19,3%
17	Provinsi Bali	10,6%	10,2%
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	19,8%	15,2%
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	12,5%	11,2%
20	Provinsi Kalimantan Barat	18,5%	14,5%
21	Provinsi Kalimantan Tengah	14,7%	22,8%
22	Provinsi Kalimantan Selatan	18,2%	16,9%
23	Provinsi Kalimantan Timur	11,4%	17,8%
24	Provinsi Kalimantan Utara	31,9%	37,4%
25	Provinsi Sulawesi Utara	19,5%	27,4%
26	Provinsi Sulawesi Tengah	13,4%	14,4%
27	Provinsi Sulawesi Selatan	11,6%	11,3%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	21,5%	21,5%
29	Provinsi Gorontalo	15,8%	18,3%
30	Provinsi Sulawesi Barat	27,3%	20,8%
31	Provinsi Maluku	20,3%	21,6%
32	Provinsi Maluku Utara	26,0%	13,8%
33	Provinsi Papua	23,4%	17,3%
34	Provinsi Papua Barat	14,4%	21,1%
Jumlah		616,7%	615,8%
Rata-Rata		18,1%	18,1%

Sumber: DJPK, Ringkasan APBD 2018

Pada tabel diatas juga disajikan perbandingan taraf belanja modal terhadap belanja antar provinsi. Rata-rata taraf belanja modal tahun 2017 dan 2018 terhadap total belanja sebesar 18,1%. Dimana selama tahun 2017 terdapat 16 provinsi dengan taraf kurang dari nilai rata-rata dan 18 provinsi memiliki nilai lebih dari rata-rata. Sedangkan pada 2018 masih ada 17 provinsi dengan nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata, dan 17 provinsi lainnya memiliki taraf melebihi nilai rata-rata (Ringkasan APBD 2018).

keadaan tersebut menerangkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia masih menganggarkan belanja modal dibawah nilai rata-rata, yaitu dibawah 18%. Nilai tersebut jauh dari nilai target yaitu sebesar 30% yang telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015).

Rendahnya realisasi belanja modal dapat mengakibatkan infrastruktur yang sudah sejak dulu tersedia tidak layak dan terhentinya pembuatan proyek-proyek baru dan tentunya dapat menyebabkan investor enggan berinvestasi didaerah, yang pada akhirnya menyebabkan ekonomi di wilayah regional terhambat, pertumbuhan ekonomi tidak dapat berkembang serta akan terus menerus bergantung pada APBN dan APBD untuk dapat menggerakkan ekonominya (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014; Kasdy, Nardisyah, dan Fahlevi, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya riset gap dan fenomena mengenai penganggaran APBD hingga tahun 2018 dinilai masih kurang produktif. Penulis mengembangkan Riset dari penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.

Perbedaan Riset ini dengan Riset sebelumnya yaitu penulis mengganti variable Dana Alokasi Umum dengan pertumbuhan ekonomi, dengan berdasarkan pada penelitian Ayem dan Dessy (2018). Karena hasil pada penelitian sebelumnya Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi belanja modal, dan pada jurnal tersebut

disarankan untuk menambahkan variabel yang dapat berpengaruh pada belanja modal seperti pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Penulis lebih memilih mengganti variabel DAU dengan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan DAK dan DBH karena permasalahan dari dana perimbangan sering menjadi temuan pemeriksaan, dimulai dari formula alokasi DBH, dasar penetapan bagi hasil, pemanfaatan DBH di daerah, dan mekanisme penyaluran DBH di daerah. DAU banyak terserap untuk biaya pegawai padahal tujuan dari pengalokasian DAU ini untuk memenuhi dan mendorong kemajuan di Daerah (Sari, Djuanda, dan Sarwani, 2018). Dan pada DAK, dana dialokasikan untuk DAK fisik (PMK RI No. 130/PMK.07/2019) dan non fisik (PMK RI No. 48/PMK.07/2019).

Oleh karena itu penulis lebih tertarik untuk mengganti variabel DAU menjadi pertumbuhan ekonomi, Karena pemanfaatan dan penyaluran DBH yang belum sesuai, DAU belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan pada DAK dana akan dialokasikan untuk tujuan khusus yang dibagi menjadi DAK fisik (PMK RI No. 130/PMK.07/2019) dan non fisik (PMK RI No. 48/PMK.07/2019).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi (Wibisono dan Wildaniati, 2016). Penerimaan daerah, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat saling berkaitan, dimana jika suatu daerah memiliki penerimaan yang tinggi maka peluang untuk mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi (Kurniawan, 2010; Malau dan Pulungan, 2019). Dari penjelasan diatas, sehingga penulis berminat untuk melaksanakan riset yang

berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Periode 2015-2019”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, didapat identifikasi masalah sebagai berikut ;

1. Sebagian pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 masih menganggarkan belanja modal dibawah rata-rata yaitu sebesar 18%.
2. Rendahnya alokasi belanja modal mengakibatkan infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada tambahan infrastruktur di Daerah.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari permasalahan penulisan, berdasarkan identifikasi masalah diatas. Maka penulis terfokus faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2015-2019. dengan variable pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variable indepen dan belanja modal sebagai varaiabel dependen.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal ?
2. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.
3. Untuk menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Riset ini hendaklah dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal.

2. Manfaat Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait dengan penganggaran belanja

modal agar dapat memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi riset-riset selanjutnya dan mampu memperkuat riset-riset sebelumnya.

### **1.7 Jadwal Penelitian**

Terlampir

### **1.8 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan sebagai pendukung perumusan hipotesis, Dalam bab ini juga menguraikan terkait penelitian-penelitian yang relevan. Selain itu dalam bab ini juga telah dijelaskan terkait kerangka berfikir dan hipotesis yang dirumuskan dari pemikiran tersebut.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang alur penelitian yang dilakukan. Terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan

sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional, dan metode analisis yang akan digunakan.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data atau yang biasa kita jumpai sebagai bukti hipotesis.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

*Agency theory* merupakan hubungan antara pemberi kerja (*principal*) dan pengelola pekerjaan (*agent*), dimana hubungan antara keduanya diikat dengan suatu perjanjian (Jensen, dan meckling, 1976; Kurniawansyah, Kurnianto, dan Rizqi, 2018). Yang dimaksud disini yaitu *agent* diberikan wewenang oleh *principal* untuk menjalankan suatu tindakan atau pekerjaan dibawah pengawasan *principal* itu sendiri.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak berdasar pada kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Untuk membatasi preferensi antar agen yang berbeda diperlukan adanya system perjanjian intensif (*incentive contracting*). Selain itu *reward* dan *punishment* merupakan bagian dari insentif yang dapat memotivasi *agent* supaya dapat bekerja atas kepentingan terbaik *principal* ( Rahmayati, 2019)

Dalam kaitannya dengan akuntansi sector publik, teori ini dapat digambarkan dengan pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent* (Nurlis, 2016). Dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan membuat otonomi daerah yang pada akhirnya pemerintah daerah harus bertanggung jawab langsung atas kemajuan daerahnya dengan tetap diawasi oleh pemerintah pusat.

Teori ini juga dapat digambarkan dengan masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Untuk dapat meningkatkan pendapatan, masyarakat telah membayar pajak, retribusi dan sebagainya (Nurlis, 2016). Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih untuk dapat menunjukkan hasil dari apa yang telah dibayarkan oleh masyarakat dengan terwujudnya sarana dan prasarana yang layak.

### **2.1.2 Pengertian Belanja Modal**

Belanja modal adalah dana yang akan dikeluarkan karena pembelian atau pemeliharaan asset tetap berwujud dan asset lainnya untuk kegiatan pemerintah daerah dan memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan (Permendagri No. 64 Tahun 2020). Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik yang akan digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah atau untuk keperluan publik yang harus dijadikan dasar dalam alokasi belanja modal (Wibisono dan Wildaniati, 2016).

Menurut Haryanto, Sahmuddin, dan Ariffuddin (2007) belanja modal merupakan dana yang digunakan untuk membeli asset atau seluruh dana yang akan digunakan untuk memperoleh asset tetap berwujud, dan asset tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta akan dapat bermanfaat untuk pelaksanaan aktifitas pemerintahan. Belanja modal dianggarkan berdasarkan harga beli atau biaya pembangunan, atau dengan kata lain seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut dianggarkan dalam belanja modal (PP No. 12

Tahun 2019 pasal 64 ayat 4). Belanja modal yang dimaksud diatas meliputi (PP No. 12 Tahun 2019 ):

1. Belanja tanah, Belanja tanah ini digunakan untuk menganggarkan tanah yang tujuan utamanya akan digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap untuk digunakan.
2. Belanja peralatan dan mesin, Belanja peralatan dan mesin akan dianggarkan untuk peralatan dan mesin yang terdiri dari mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lain yang bernilai serta memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun dan siap digunakan.
3. Belanja bangunan dan gedung, Belanja bangunan dan gedung dimaksudkan untuk menganggarkan gedung dan bangunan meliputi seluruh gedung dan bangunan yang mencakup seluruh gedung dan struktur yang akan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap untuk digunakan.
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, Belanja jalan, irigasi, dan jaringan merupakan anggaran yang akan diperuntukkan sebagai penganggaran jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap digunakan.
5. Belanja asset tetap lainnya, Belanja asset tetap lainnya ini dianggarkan untuk asset tetap yang tidak diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Dimana asset tetap tersebut didapat dan akan dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas operasional pemerintah daerah serta siap untuk digunakan.

6. Belanja asset lainnya, Belanja asset lainnya akan dianggarkan sebagai asset yang tidak akan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan tidak terklasifikasi dalam asset tetap. Aset lainnya ini sepatutnya tersaji dalam akun asset lainnya dan akan dicatat sebesar nilai pada neraca.

### **2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu:

- 1 Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2 Jasa giro
- 3 pendapatan bunga
- 4 keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5 komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai hasil dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Soekarwo (2003) menyebutkan bahwa, jika suatu daerah memiliki pendapatan tinggi yang berasal dari kemampuan pengembangan daerahnya, daerah tersebut memiliki kesempatan besar menggunakan dana tersebut untuk keperluan masyarakat di daerah tersebut dan terhindar dari adanya kepentingan pemerintah

pusat yang tidak sesuai pada apa yang dibutuhkan masyarakat (Kasdy, Nardisyah, dan Fahlevi, 2018).

Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang berisi tujuan dari pendapatan asli daerah itu sendiri yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada suatu daerah untuk menggali pendanaaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

#### **2.1.4 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja anggaran dalam satu periode akuntansi (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020). SILPA merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun berkenaan, atau defisit anggaran dengan pembiayaan bersih. Dalam penyusunan APBD angka SILPA harus nol karena penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada dan jika masih terdapat defisit anggaran positif atau masih terdapat sisa dari pembiayaan netto dana tersebut harus dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan yang ada di daerah (DJPK).

Menurut Sujarweni (2015: 70) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sisa dari realisasi penerimaan dan pengeluaran dari apa yang telah ditaksirkan sebelumnya pada satu waktu anggaran. SILPA yang dihasilkan dari sisa taksiran tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutup kekurangan anggaran, membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, serta membiayai beberapa kewajiban yang hingga akhir periode anggaran tak kunjung selesai.

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 SILPA merupakan penganggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang harus didasarkan dengan perhitungan cermat untuk memperkirakan anggaran dan menghindari adanya pengeluaran pada tahun selanjutnya. SiLPA dapat bersumber dari:

- 1 Sisa lebih penerimaan PAD
- 2 Sisa lebih penerima pendapatan transfer
- 3 Sisa lebih penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 4 Sisa lebih penerimaan pembiayaan
- 5 Hasil dari penghematan pajak
- 6 Kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dapat selesai
- 7 Sisa dana karena target tidak tercapai dan sisa dana pengeluaran pembiayaan

### **2.1.5 Pengertian Luas Wilayah**

Wilayah merupakan daerah yang menjadi kekuasaan atau wilayah yang dijadikan kekuasaan pemerintahan baik untuk pemerintah negara, daerah, dan sebagainya. Luas wilayah pemerintahan adalah luas total wilayah suatu pemerintah daerah (Afkarina dan Hermanto, 2017). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan suatu variable yang mampu memberikan gambaran terkait kebutuhan atas penyediaan pelayanan publik dalam satuan per wilayah. Luas wilayah diukur dengan menggunakan indikator  $KM^2$  (Wibisono dan Wildaniati, 2016).

Pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan tidak luas pada umumnya kebutuhan untuk memenuhi pelayanan masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan luas. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Karena daerah yang memiliki wilayah cukup luas akan memerlukan biaya pembangunan yang cukup besar. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar (Afkarina dan Hermanto, 2017).

#### **2.1.6 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Nasional Bruto (PNB) terlepas dari apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk atau melihat apakah terdapat perubahan struktur ekonomi pada suatu negara (Hasan dan Azis, 2018: 9). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat tingkat produktivitas suatu negara pada setiap tahunnya, dan secara ekonomi ukuran produktivitas ini menggunakan produk domestik bruto atau produk nasional bruto (Hasan dan Azis, 2018: 11).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pula sebagai perkembangan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah ekonomi pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto (PDB)/ produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ataupun pada setiap sector dari tahun ke tahun (BPS).

Pertumbuhan ekonomi digunakan pemerintah daerah untuk menggambarkan pembangunan ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu Negara, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur besaran barang dan jasa yang diproduksi oleh wilayah regional atau daerah (Wibisono dan Wildaniati, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$  = PDRB tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$  = PDRB tahun sebelumnya

Perhitungan pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan sebagai pengukur kemajuan perekonomian suatu daerah, yang dihasilkan dari pembangunan nasional, dan yang dijadikan dasar pembuatan perkiraan bisnis, terkhusus pada persamaan penjualan (BPS).

## 2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Ada juga beberapa penelitian yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Yang pertama penelitian Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Regresi linear berganda adalah metode analisis yang



digunakan dalam penelitian ini. Serta menggunakan 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah sebagai populasi.

Variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal dan variabel independennya yaitu PAD, SILPA, DAU, dan luas wilayah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Malau dan Pulungan (2019) juga telah melakukan penelitian terkait belanja modal dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Malau dan Pulungan (2019) menggunakan 33 Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara sebagai populasi data. Penelitian ini menggunakan belanja modal untuk variabel terikat dan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, serta DAK sebagai variabel bebas. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh terhadap Belanja modal.

Syukri dan Hinaya (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Unum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan, dengan data sekunder. Regresi linear berganda adalah metode analisis yang

digunakan dalam penelitian ini. Dan menggunakan 24 Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan sebagai populasi.

Penelitian ini memiliki variabel dependen berupa belanja modal dan variabel independennya berupa PAD, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi, DAU, dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ayem dan Pratama (2018) melakukan penelitian terkait belanja modal yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dan menggunakan 5 Kabupaten/ Kota di DIY sebagai populasi data penelitian.

Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai variabel dependen sedangkan pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, dan PAD sebagai variabel independen. Pada penelitian ini hanya pertumbuhan ekonomi saja yang berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variable yang lain tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan, Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu. Menunjukkan bahwa PAD, DAK,

pendapatan lain-lain, dan penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sedangkan DAU berpengaruh negative terhadap belanja modal. Dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Uji asumsi klasik dan regresi linear merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10 Kabupaten/ Kota di Bengkulu.

Kasdy, Nadirsyah, dan Fahlevi. (2018) juga meneliti terkait belanja modal dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Analisis jalur merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian Kasdy, Nadirsyah, dan Fahlevi (2018). Serta menggunakan 513 Kabupaten/ Kota di Indonesia sebagai populasi data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, SILPA dan belanja modal baik secara simultan maupun secara parsial memiliki pengaruh terhadap realisasi belanja modal. belanja modal sepenuhnya memediasi dana perimbangan dan SiLPA terhadap realisasi belanja modal, sedangkan PAD terhadap realisasi belanja modal dimediasi sebagian oleh belanja modal.

Penelitian Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal

Kabupaten/Kota Se-Bali. Yang menunjukkan bahwa PAD dan SiLPA dapat mempengaruhi belanja modal.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi, DAU, dan DAK tidak mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan adalah 9 Kabupaten/ Kota di Bali.

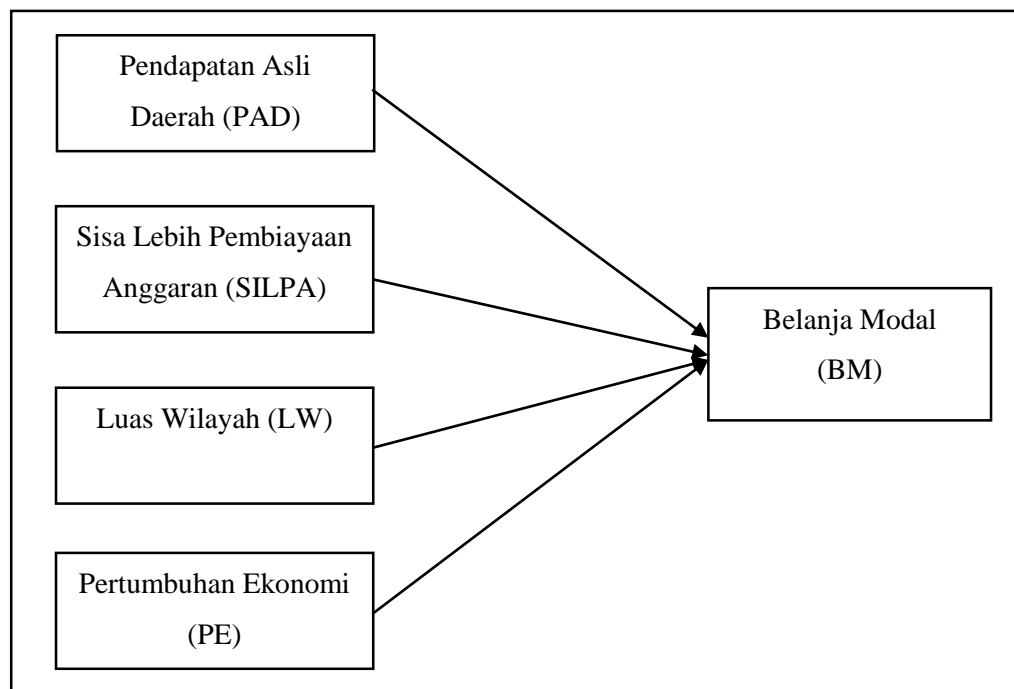
Penelitian Kosim (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. Menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Dimana Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan menggunakan data sekunder. Analisis *Ex Post Facto*, regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kota Banjar 2007-2014.

Nurlis (2016) juga telah melakukan penelitian terkait belanja modal dengan judul *The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia*. Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dengan data sekunder. Regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Provinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepadatan penduduk, PDRB, dan Pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Namun PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Wildaniati (2016) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan PAD, SiLPA, dan Luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder. Regresi linear berganda adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dan menggunakan 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur sebagai populasi.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



Sebagian pemerintah provinsi di Indonesia masih menganggarkan belanja modal dibawah rata-rata. Rendahnya alokasi belanja modal tersebut dapat mengakibatkan pembangunan ataupun perbaikan pada infrastruktur terhambat. Hal ini membuat investor berfikir dua kali untuk berinvestasi pada suatu Daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan perekonomian daerah tidak berkembang dan akan membuat Daerah tersebut selalu bergantung pada APBN dan APBD sebagai penggerak ekonomi (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014; Kasdy, Nardisyah, dan Fahlevi, 2018).

Faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil daerah tersebut. Sehingga pembiayaan belanja modal dapat didanai dengan pendapatan asli daerah tersebut.

Pada setiap periode anggaran tidak menutup kemungkinan terdapat selisih antara yang dianggarkan dan realisasi di lapangan, selisih tersebut disebut dengan SILPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Jika terdapat SILPA positif atau antara anggaran dan realisasi lebih besar anggaran, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.

Setiap Daerah memiliki luas yang berbeda-beda, Pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan kurang luas pada umumnya membutuhkan pelayanan masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan luas. Setiap daerah memiliki potensi daerah yang berbeda-beda, sehingga pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda-beda pula. Daerah yang

memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendapat investasi modal lebih tinggi.

## **2.4 Perumusan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapat dari daerah tersebut, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Permendagri No 64 Tahun 2020). Oleh karena itu untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum, pemerintah harus memperhatikan pengembangan dan peningkatan pendapatan yang berasal dari daerahnya dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang terdapat pada daerah kedaulatannya.

Hasil dari penelitian Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Riset yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Uraian diatas sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa APBD dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta kesanggupan suatu daerah untuk mendatangkan pemasukan bagi daerahnya. Oleh karena itu pada penyusunan belanja modal juga

harus dilakukan penyesuaian dengan pemasukan yang didapat oleh daerah itu sendiri. Maka jika pemerintah daerah memiliki keinginan untuk melakukan peningkatan nilai belanja modal, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh rumusan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **2.4.2 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sisa dari realisasi pendapatan dan belanja anggaran pada periode sebelumnya selama tidak lebih dari satu periode anggaran (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020). Pada permendagri No. 64 Tahun 2020 disebutkan bahwa jika terdapat SILPA positif (defisit anggaran lebih kecil dari pembiayaan netto) pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan SILPA positif tersebut dengan menambahkan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah.

SILPA positif adalah sumber pendanaan untuk alokasi belanja modal, dimana belanja modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Pada penelitian Wibisono dan Wildaniati (2016) menyebutkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitain Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) juga menunjukkan hasil yang sama



yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **2.4.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal**

Menurut Wibisono dan Wildaniati (2016) luas wilayah merupakan suatu ruang yang memiliki kesatuan geografis dimana batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administratif dan fungsional. Luas wilayah dapat diukur dengan menggunakan indikator  $KM^2$ . Pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan tidak begitu luas pada umumnya kebutuhan infrastrukturnya lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan luas (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Sehingga pemerintah daerah dengan daerah yang luas akan memerlukan alokasi belanja modal yang cukup besar.

Pada penelitian Wibisono dan Wildaniati (2016) menunjukkan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) yang menyebutkan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>. Luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Kebijakan otonomi daerah diarahkan pada percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat (Rahmayati, 2019). Namun kesanggupan suatu daerah dalam mengelola potensi daerah, ketersediaan infrastruktur daerah serta setiap pemerintah daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Perbedaan ini kemudian membuat pertumbuhan ekonomi tiap daerah berbeda pula.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu (Wibisono dan Wildaniati, 2016). Pendapatan daerah, Pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat saling berkaitan erat. Dimana jika suatu daerah memiliki penerimaan yang tinggi akan semakin tinggi pula peluang untuk membangun ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2010; Malau dan Pulungan, 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda, hal ini dikarenakan beragamnya potensi setiap daerah. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi modal swasta dan pemerintah akan ikut serta meningkat. hal inilah yang kemudian membuat pemerintah lebih bebas ketika penyusunan anggaran belanja modal.

Pada penelitian Ayem dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Dan penelitian yang dilakukan oleh Malau dan Pulungan (2019) memiliki hasil yang

sama dengan penelitian Ayem dan Pratama (2018) yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat, sebagai berikut:

H<sub>4</sub>. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia Periode 2015-2019 dengan menggunakan laporan realisasi APBD yang diambil dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan data PDRB atas dasar harga konstan serta data luas wilayah diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2020 hingga selesai.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah Penelitian kuantitatif. Dimana informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka serta akan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017: 23). Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dimana penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variable independen terhadap variable dependen (Nurlis, 2016). Dengan variable independen PAD (X1), SILPA (X2), luas wilayah (X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4). Dan variable dependennya adalah belanja modal (Y).

### **3.3 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Suatu wilayah yang digunakan untuk membentuk suatu gagasan yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang memenuhi

kriteria peneliti untuk kemudian dikaji dan diambil kesimpulannya biasa disebut dengan populasi (Sugiyono, 2017: 136). Yang dijadikan populasi dalam riset ini yaitu seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan periode 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Sehingga jumlah populasi pada penelitian ini 170 (34 pemerintah provinsi  $\times$  5 tahun).

Tabel 3.1  
Populasi Penelitian

No.	Nama Provinsi
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara
3	Provinsi Sumatera Bara
4	Provinsi Riau
5	Provinsi Jambi
6	Provinsi Sumatera Selatan
7	Provinsi Bengkulu
8	Provinsi Lampung
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Provinsi Kepulauan Riau
11	Provinsi DKI Jakarta
12	Provinsi Jawa Barat
13	Provinsi Jawa Tengah
14	Provinsi D,I, Yogyakarta
15	Provinsi Jawa Timur
16	Provinsi Banten
17	Provinsi Bali
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Provinsi Kalimantan Barat
21	Provinsi Kalimantan Tengah
22	Provinsi Kalimantan Selatan
23	Provinsi Kalimantan Timur

Tabel berlanjut ....

Lanjutan Tabel 3.1

24	Provinsi Kalimantan Utara
25	Provinsi Sulawesi Utara
26	Provinsi Sulawesi Tengah
27	Provinsi Sulawesi Selatan
28	Provinsi Sulawesi Tenggara
29	Provinsi Gorontalo
30	Provinsi Sulawesi Barat
31	Provinsi Maluku
32	Provinsi Maluku Utara
33	Provinsi Papua
34	Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan jumlah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017: 137). Sampel yang diambil dari populasi diharapkan dapat mewakili. Pada penelitian ini penulis menjadikan seluruh anggota populasi penelitian sebagai sampel, karena penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 170 data.

### 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 139) teknik pengambilan sampel disebut dengan teknik *sampling*. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik *sampling* yang dapat digunakan. Teknik pengambilan *sampling* pada penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh.

*Sampling* jenuh merupakan sampel yang jika ditambah, tidak dapat menambah keterwakilan maka tidak dapat mempengaruhi nilai informasi yang diperoleh, atau dapat diartikan sebagai sampel yang ada sudah maksimum karena jika ditambah jumlahnya tidak dapat merubah keterwakilan populasi (Sugiyono, 2017: 144). Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 34 provinsi di Indonesia selama 5 tahun yaitu pada 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 170 data.

### **3.4 Data Dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan informasi sekunder. Informasi sekunder ialah informasi yang sumbernya tidak langsung membagikan informasi kepada pengumpul informasi, misal melalui orang lain ataupun melalui dokumen (Sugiyono, 2017: 2019). Data untuk variable pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja modal menggunakan laporan realisasi APBD yang diambil di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Sedangkan untuk variable luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi diambil dari *website* Badan Pusat Statistik.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada riset ini adalah metode dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi disini adalah catatan peristiwa yang sudah ada sebelumnya seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017: 476). Misalnya data yang dipublikasi di situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan data yang dipublikasikan di situs Badan Pusat Statistik.

### 3.6 Variabel Penelitian

#### 3.6.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variable yang dapat dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas disebut dengan variabel terikat (Sugiyono, 2017: 68). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu belanja modal (Y).

#### 3.6.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan variable yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan munculnya variabel terikat (Sugiyono, 2017: 68). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (X1), sisa lebih pembiayaan anggaran (X2), luas wilayah (X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4).

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2  
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Skala	Rumus
Variabel Dependen			
Belanja Modal	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi (DJPk).	Rasio	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya. (Ayem dan Pratama,2018)

Tabel berlanjut ....



Lanjutan Tabel 3.2

Variabel Independen			
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diproksikan dengan produk domestik regional bruto (Ayem dan Pratama, 2018)	Rasio	Pertumbuhan Ekonomi = $(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / (PDRB_{t-1}) \times 100\%$ Keterangan : PDRB <sub>t</sub> : Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sekarang PDRB-1 : Produk Domestik Regional Bruto Tahun Lalu (Ayem dan Pratama, 2018)
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan (DJPK).	Rasio	PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain lain pendapatan daerah yang sah (Ayem dan Pratama, 2018)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu penerimaan pembiayaan untuk menutupi adanya kekurangan dana karena realisasi penerimaan lebih kecil dari pada realisasi pengeluaran (Wibisono dan Wildaniati, 2016)	Rasio	SILPA = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto (Kusumawardani, 2018; Maulana, Masitoh, Dewi, 2020)
Luas Wilayah	Luas wilayah adalah suatu kesatuan geografis yang unsur batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administratif (Wibisono dan Wildaniati, 2016).	Rasio	Luas wilayah dapat diukur dengan melihat luas wilayah tersebut dengan satuan $KM^2$ (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020)

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Riset ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik baru akan dilakukan uji regresi linear berganda. Regresi berganda tersebut digunakan untuk melihat apakah pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi belanja modal pada Provinsi di Indonesia periode 2015-2019.

#### **3.8.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variable pengganggu atau untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi. Model regresi dikatakan baik jika data yang digunakan telah terdistribusi normal. Untuk mendeteksi apakah data yang digunakan telah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Pada uji *Kolmogrov-Smirnov* suatu variable dapat dikatakan normal jika nilai probabilitas signifikansi suatu variable lebih dari  $\alpha = 0,05$  (Ghozali, 2018: 31).

##### **2. Uji Multikoleniaritas**

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variable bebas pada model regresi dapat dilakukan dengan pengujian multikoleniaritas (Ghozali, 2018: 107).

Pada penelitian ini Untuk mengetahui apakah dalam model terdapat masalah multikoleniaritas atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation vactor* (VIF). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikoleniaritas yaitu (Ghozali, 2018: 108):

- 1 Jika nilai  $\text{tolerance} \leq 0,10$  dan nilai  $\text{VIF} \geq 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikoleniaritas antar variabel independen dalam model regresi.
- 2 Jika nilai  $\text{tolerance} \geq 0,10$  dan nilai  $\text{VIF} \leq 10$ , maka dapat disimpulakn bahwa tidak terdapat multikoleniaritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji ini hanya digunakan untuk korelasi tingkat satu, harus terdapat konstanta, dan tidak terdapat variable lagi diantara variable independen (Ghozali, 2018: 112). Hipotesis yang akan digunakan adalah:

$H_0$  : tidak terdapat masalah autokorelasi pada model

$H_A$  : terdapat masalah autokorelasi pada model

Tabel 3.3  
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018: 112);

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$

Tabel berlanjut ....

Lanjutan tabel 3.3

Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tdk ada autokorelasi positif atau negatif	TidakTolak	$du < d < 4-du$

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi (Ghozali, 2018: 137). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan korelasi *Sperman's Rho*. Model regresi dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas jika nilai sig. (2-tailed) masing-masing variable lebih dari 0,05 (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020).

#### 3.8.2 Uji Ketepatan Model

##### 1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat, dan untuk mengukur ketepatan model fungsi dari regresi sampel pada penelitian ini menggunakan uji *Goodness of fit* dengan melihat nilai statistik dari uji F. Kriteria dalam pengujian ini menggunakan angka signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi > 0,05 berarti model penelitian tidak layak digunakan (Ghozali, 2018: 98).

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan 1. Nilai Adjusted  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas dan nilai Adjusted  $R^2$  mendekati 1 berarti variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variable dependen (Ghozali, 2018: 97).

### 3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Fungsi dilakukannya analisis regresi ini yaitu untuk dapat melihat seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta untuk menunjukkan arah hubungan antara variable-variabel tersebut (Ghozali, 2018: 96 ). Model dari regresi linier berganda ini dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_3 LW + \beta_4 PE + \varepsilon$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

LW : Luas Wilayah

PE : Pertumbuhan Ekonomi

$\varepsilon$  : Standar Error

#### **3.8.4 Uji Hipotesis (Uji T)**

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen (Ghozali, 2018: 98). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel maka hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018: 99).

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2015-2019. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal tersebut meliputi pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia berjumlah 34 provinsi.

Provinsi di Indonesia yang menjadi populasi dan sampel dari penelitian adalah 34 provinsi, sebagai berikut :

Tabel 4.1

No.	Nama Provinsi
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara
3	Provinsi Sumatera Bara
4	Provinsi Riau
5	Provinsi Jambi
6	Provinsi Sumatera Selatan
7	Provinsi Bengkulu
8	Provinsi Lampung
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Provinsi Kepulauan Riau
11	Provinsi DKI Jakarta
12	Provinsi Jawa Barat
13	Provinsi Jawa Tengah
14	Provinsi D.I. Yogyakarta
15	Provinsi Jawa Timur
16	Provinsi Banten
17	Provinsi Bali

Tabel berlanjut ....

Lanjutan Tabel 4.1

18	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Provinsi Kalimantan Barat
21	Provinsi Kalimantan Tengah
22	Provinsi Kalimantan Selatan
23	Provinsi Kalimantan Timur
24	Provinsi Kalimantan Utara
25	Provinsi Sulawesi Utara
26	Provinsi Sulawesi Tengah
27	Provinsi Sulawesi Selatan
28	Provinsi Sulawesi Tenggara
29	Provinsi Gorontalo
30	Provinsi Sulawesi Barat
31	Provinsi Maluku
32	Provinsi Maluku Utara
33	Provinsi Papua
34	Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 170 data, data pendapatan asli daerah (PAD) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) didapatkan dari laporan realisasi APBD pemerintah provinsi di Indonesia periode 2015-2019 yang dipublikasikan oleh website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Serta data produk domestik regional bruto (PDRB) dan luas wilayah berasal dari Badan Pusat Statistik Nasional.

Alat untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 23. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yaitu metode pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 170 data dengan lima periode pengamatan dimulai dari tahun 2015 hingga 2019.



Namun setelah dilakukan uji autokorelasi pada data terdapat gejala autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi yang pertama yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Uji Durbin Watson  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,917 <sup>a</sup>	,840	,836	18654443408 24,09700	,787

a. Predictors: (Constant), PE, PAD, LW, SILPA

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Output SPSS

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai DW 0,787. Jika dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah data 170 dan jumlah variabel independen 4 (n=4) diperoleh nilai dl=1,7012 dan nilai du=1,7975. Maka diperoleh nilai DW=0,787 berada dibawah nilai dl=1,7012, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif pada uji autokorelasi yang pertama. Karena terjadi autokorelasi positif, nilai standar error dan nilai t-statistik tidak dapat dipercaya sehingga diperlukan pengobatan.

Untuk mengobati autokorelasi ini penulis menggunakan Durbin's two-step Method. Pengobatan autokorelasi dengan metode ini berasumsi bahwa nilai  $\rho$  tidak diketahui nilainya dan dapat diestimasi dengan beberapa cara yaitu (Ghozali, 2018: 126):

1. Nilai  $\rho$  diestimasi dengan *Durbin-Watson d*

$$\rho = 1 - \frac{d}{2} = 1 - \frac{0,787}{2} = 0,6065$$

2. Nilai  $\rho$  diestimasi dengan *Theil-Nagar d*

$$\rho = \frac{n^2 \left(1 - \frac{d}{2}\right) + k^2}{n^2 - k^2} = \frac{170^2 \left(1 - \frac{0,787}{2}\right) + 4^2}{170^2 - 4^2} = 0,6067$$

3. *The Cochran-Orcutt two-step Procedure*

Tabel 4.3

Pengobatan Uji Durbin Watson  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,001	,015		-,043	,966
ut_1	,640	,059	,655	10,816	,000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : Hasil Output SPSS

Hasil output spss diatas menunjukkan nilai  $\rho$  pada iterasi pertama yaitu sebesar 0,640 (koefisien variabel ut\_1).

Tabel 4.4

Pengobatan Durbin Watson  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,905	,270		14,452	,000
lnpad_plnpad_1	,428	,029	,709	14,944	,000
lnsilpa_plnsilpa_1	,161	,029	,255	5,522	,000
lnlw_plnlw_1	,232	,018	,402	12,613	,000
lnpe_plnpe_1	,196	,073	,081	2,676	,008

a. Dependent Variable: lnbm\_plnbm\_1

Sumber : Hasil Output SPSS

Hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa nilai  $\beta^*2$  sebesar 0,428, nilai  $\beta^*3$  sebesar 0,161, nilai  $\beta^*4$  0,232, dan nilai  $\beta^*5$  sebesar 0,196. Dan nilai  $\beta^*1 = \beta_1(1 - \rho) = (0,001) * (1 - 0,640) = 0,00036$ .

Tabel 4.5  
Pengobatan Uji Durbin Watson  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,384	,561		6,037	,000
Lagut	,645	,059	,660	10,966	,000

a. Dependent Variable: Ut

Sumber : Hasil Output SPSS

Hasil output SPSS diatas menunjukkan nilai  $\rho$  sebesar 0,645 pada iterasi kedua. Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai  $\rho$  dari berbagai methode seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.6  
Pengobatan Uji Durbin Watson

Metode	Nilai $\rho$
Durbin-Watson d	0,6065
Theil Nagar d	0,6067
Cochrane Orcutt Step 1	0.640
Cochrane Orcutt Step 2	0,645

Ketiga metode ternyata menghasilkan nilai  $\rho$  yang hampir sama. Untuk itu penulis memilih metode Durbin-Watson d untuk mentransformasikan persamaan regresi.

Tabel 4.7  
Pengobatan Uji Durbin Watson

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	2,064

a. Predictors: (Constant), lnpe@1, lnpad@1, lnlw@1, lnsilpa@1

b. Dependent Variable: lnbm@1

Sumber : Hasil Output SPSS

Pada Uji Autokorelasi yang pertama menunjukkan bahwa terdapat Autokorelasi positif dengan nilai durbin Watson sebesar 0,787. Setelah dilakukan pengobatan nilai durbin watsonnya menjadi 2,064 dengan  $n=170$  dan  $k=4$ . Maka diperoleh nilai  $dl=1,7012$  dan  $4-dl=2,2988$ , serta nilai  $du=1,7975$  dan  $4-du=2,2025$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai DW berada diantara  $du$  dan  $4-du$  ( $1,7975 < 2,064 < 2,2025$ ) dan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Setelah dilakukan pengobatan autokorelasi dengan durbin's two-step method dan mentransformasikan persamaan regresi, didapat jumlah data akhir yang akan digunakan untuk olah data. Data akhir yang akan digunakan untuk olah data tersebut berjumlah 158 data.

## 4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD, SILPA, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat

Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Nasional periode 2015-2019.

#### 4.2.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual telah terdistribusi normal dapat dilakukan uji normalitas (Ghozali, 2018: 161). Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* digunakan untuk menguji normalitas pada penelitian ini.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		158
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		
	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,24728923
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,064
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,003 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig. (2-tailed)	,141 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,132
	Upper Bound	,150

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Hasil uji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil dari uji kolmogrov-smirnov diketahui nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,141. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 atau 5%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas dapat dilakukan dengan uji multikolinearitas. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tollerance* dan *VIF* (Ghozali, 2018: 107).

Tabel 4.9  
Hasil Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,677	,469		5,708	,000		
PAD	,520	,050	,574	10,491	,000	,807	1,239
SILPA	,117	,030	,213	3,884	,000	,802	1,246
LW	,269	,031	,432	8,549	,000	,947	1,055
PE	,016	,085	,010	,193	,847	,992	1,008

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), luas wilayah (LW), dan pertumbuhan ekonomi (PE) tidak ada

yang nilainya kurang dari 0,1 dan nilai VIF dari ke empat variabel lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi pada setiap variabel bebas dalam penelitian ini atau tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

### 3. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (tahun sebelumnya) (Ghozali, 2018: 111). Pada penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W).

Tabel 4.10  
Hasil Uji Durbin-Watson  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1.	,794 <sup>a</sup>	,631	,621	,25050	2,064

a. Predictors: (Constant), PE, PAD, LW, SILPA

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Pada tingkat signifikansi 5% jumlah data 170 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 4 ( $k=4$ ), nilai batas atas ( $dU$ ) 1,7975 dan batas bawah ( $dL$ ) 1,7012 didapat dari tabel durbin-watson. hasil akhir dari nilai DW 2,064 lebih besar dari batas atas ( $dU$ ) 1,7975 dan kurang dari  $4-1,7975 = 2,2025$  ( $4-dU$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model penelitian ini.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain (Ghozali, 2018: 137). Pada penelitian ini untuk pengujian Heteroskedastisitas menggunakan uji *Spearman's Rho*.

Tabel 4.11  
Hasil Uji *Spearman Rho's*

#### Correlations

			AbsRes5	PAD	SILPA	LW	PE
Spearman's rho	AbsRes5	Correlation Coefficient	1,000	-,117	-,010	-,077	-,096
		Sig. (2-tailed)	.	,144	,900	,333	,229
		N	158	158	158	158	158
PAD	PAD	Correlation Coefficient	-,117	1,000	,440**	,002	,002
		Sig. (2-tailed)	,144	.	,000	,980	,979
		N	158	169	169	169	158
SILPA	SILPA	Correlation Coefficient	-,010	,440*	1,000	,128	-,037
		Sig. (2-tailed)	,900	,000	.	,096	,642
		N	158	169	169	169	158
LW	LW	Correlation Coefficient	-,077	,002	,128	1,000	,056
		Sig. (2-tailed)	,333	,980	,096	.	,488
		N	158	169	169	169	158
PE	PE	Correlation Coefficient	-,096	,002	-,037	,056	1,000
		Sig. (2-tailed)	,229	,979	,642	,488	.
		N	158	158	158	158	158

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa ke empat variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.



#### 4.2.2 Uji Ketepatan Model

##### 1. Uji F

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengukur ketepatan model fungsi dari regresi sampel. Sehingga penelitian ini menggunakan uji *Goodness of fit* dengan melihat nilai statistik dari uji F (Ghozali, 2018: 98).

Tabel 4.12  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	16,389	4	4,097	65,294	,000 <sup>b</sup>
Residual	9,601	153	,063		
Total	25,990	157			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PE, PAD, LW, SILPA

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel 4.12 didapat nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi layak atau dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal.

##### 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan variasi variable dependen yaitu dengan menguji koefisien determinasinya ( $R^2$ ) (Ghozali, 2018: 97).

Tabel 4.13  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	,794 <sup>a</sup>	,631	,621	,25050

a. Predictors: (Constant), PE, PAD, LW, SILPA

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel 4.13 didapat nilai *R Square* sebesar 0,631 atau 63,1%. Hal ini berarti keempat variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), luas wilayah (LW), pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 63,1%. Dan sisanya 36,9% (100% - 63,1%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2018: 96). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah belanja modal dan yang menjadi variabel independen adalah pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), luas wilayah (LW), pertumbuhan ekonomi (PE).

Tabel 4.14  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,677	,469		5,708	,000		
PAD	,520	,050	,574	10,491	,000	,807	1,239
SILPA	,117	,030	,213	3,884	,000	,802	1,246
LW	,269	,031	,432	8,549	,000	,947	1,055
PE	,016	,085	,010	,193	,847	,992	1,008

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.14 diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,677 + 0,520 \text{ PAD} + 0,117 \text{ SILPA} + 0,269 \text{ LW} + 0,016 \text{ PE} + e$$

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,677 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan (PAD = 0, SILPA= 0, LW=0, PE=0) maka belanja modal tiap daerah sebesar 2,677.
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) senilai 0,520 berarti bahwa setiap peningkatan nilai PAD sebesar 1% maka nilai belanja modal akan meningkat sebesar 52 % dengan mengasumsikan variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) senilai 0,117 menyatakan bahwa setiap peningkatan nilai SILPA sebesar 1% maka nilai

belanja modal akan ikut meningkat sebesar 11,7% dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan.

4. Koefisien regresi luas wilayah (LW) senilai 0,269 berarti bahwa setiap peningkatan nilai luas wilayah sebesar 1%, nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 26,9% dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan.
5. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,016 berarti bahwa setiap peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 1,6% dengan berasumsi bahwa variabel lain konstan.

#### **4.2.4 Uji Hipotesis**

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  maka hipotesis diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018:99).

Tabel 4.15  
Hasil Uji Hipotesis  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,677	,469		5,708	,000		
PAD	,520	,050	,574	10,491	,000	,807	1,239
SILPA	,117	,030	,213	3,884	,000	,802	1,246
LW	,269	,031	,432	8,549	,000	,947	1,055
PE	,016	,085	,010	,193	,847	,992	1,008

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan table 4.15, menunjukkan bahwa:

1. Nilai  $t_{hitung}$  dari variable pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 10,491 dan nilai  $t_{tabel} = 1,97559$ . Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat *signifikansi*  $0,000 < \alpha (0,05)$ , maka  $H_1$  diterima. Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Nilai  $t_{hitung}$  dari variable sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 3,884 dan nilai  $t_{tabel} = 1,97559$ . Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat *signifikansi*  $0,000 < \alpha (0,05)$ , sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini berarti variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Nilai  $t_{hitung}$  dari variable luas wilayah (LW) sebesar 8,549 dan nilai  $t_{tabel} = 1,97559$ . Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat *signifikansi*  $0,000 < \alpha (0,05)$ , maka  $H_3$  diterima. Hal ini berarti variabel luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Nilai  $t_{hitung}$  dari variable pertumbuhan ekonomi sebesar 0,193 dan nilai  $t_{tabel} = 1,97559$ . Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat *signifikansi*  $0,847 > \alpha (0,05)$ , sehingga  $H_4$  ditolak. Hal tersebut berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi belanja modal.

### **4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data**

#### **4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004).

Pemerintah provinsi yang memiliki nilai pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 2019 adalah DKI Jakarta yaitu senilai Rp45.707.400.003.802,00 dengan belanja modal Rp11.551.927.779.590,00. Dan pemerintah provinsi dengan nilai PAD paling rendah yaitu Sulawesi Barat dengan PAD senilai Rp773.573.551.035,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp1.834.565.392.670,00.

Hal tersebut berarti peningkatan pendapatan asli daerah akan diikuti pula peningkatan dari belanja modal pada pemerintah provinsi tahun 2015 hingga 2019. Begitu pula sebaliknya penurunan pendapatan asli daerah akan diikuti pula penurunan nilai belanja modal pada pemerintah provinsi tahun 2015 hingga 2019.

Dapat disimpulkan bahwa Jika suatu daerah memiliki pendapatan tinggi yang berasal dari kemampuan pengembangan daerahnya, daerah tersebut memiliki kesempatan besar menggunakan dana tersebut untuk keperluan masyarakat di daerah tersebut dan terhindar dari adanya kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Soekarwo, 2003; Kasdy, Nardisyah, dan Fahlevi, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Malau dan Pulungan (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.3.2 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal**

Sisa lebih pembiayaan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode akuntansi (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020).

Pemerintah provinsi yang memiliki nilai sisa lebih pembiayaan anggaran paling tinggi pada tahun 2019 adalah Jawa Timur yaitu senilai Rp18.611.985.530.268,00 dengan belanja modal Rp21.119.933.351.888,00. Dan pemerintah provinsi dengan nilai SILPA paling rendah yaitu Sulawesi Barat dengan SILPA senilai Rp223.589.475.023,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp1.834.565.392.670,00.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal akan ikut serta meningkat pada pemerintah provinsi tahun 2015 hingga 2019. Begitu pula sebaliknya ketika sisa lebih pembiayaan anggaran menurun, nilai belanja modal akan ikut serta turun pada pemerintah provinsi tahun 2015 hingga 2019.

Dalam penyusunan APBD angka SILPA harus nol karena penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada, namun jika masih terdapat defisit anggaran positif atau masih terdapat sisa dari pembiayaan netto, dana tersebut harus dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan yang ada di daerah (DJPk).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017). yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.3.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal**

Luas wilayah terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 luas wilayah adalah suatu variable yang mampu memberikan gambaran terkait kebutuhan atas penyediaan pelayanan publik dalam satuan per wilayah.

Pemerintah provinsi yang memiliki wilayah yang paling luas pada tahun 2019 adalah Papua yaitu 319.036,05  $KM^2$  dengan belanja modal Rp9.839.848.666.772,00. Sedangkan pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta yang



memiliki luas wilayah 3.133,15  $KM^2$  memiliki belanja modal senilai Rp3.066.603.623.327,00.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki wilayah kedaulatan yang luas akan membutuhkan belanja modal yang tinggi pada pemerintah provinsi tahun 2015 hingga 2019. Begitu pula sebaliknya jika suatu wilayah tidak terlalu luas maka kebutuhan akan belanja modal akan lebih sedikit pada pemerintah provinsi tahun 2015 hingga 2019.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Wildaniati (2016) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Pemerintah provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2019 adalah Sulawesi Tengah yaitu 7% dengan belanja modal Rp4.273.366.469.231,00. Dan pemerintah provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu Papua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -16% memiliki nilai belanja modal senilai Rp 9.839.848.666.772,00.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan tidak memberikan pemasukan secara langsung kepada daerah (Sari, Kepramareni,

dan Novitasari, 2017). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Syukri dan Hinaya (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Wildaniati (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2015-2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.
3. Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintah provinsi di Indonesia.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi daerah masing-masing untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
2. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) diharapkan pemerintah dapat mengalokasikannya ke belanja modal, Supaya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan di daerahnya.
3. Pemerintah pusat diharapkan dapat melihat aspek lain dalam mengalokasikan belanja modal untuk setiap pemerintah daerah, yaitu dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi geografis setiap daerah. Karena apabila daerah dengan padat penduduk dan memiliki wilayah yang luas akan membutuhkan biaya lebih untuk pembangunan daerah.
4. Pada penelitian ini hanya terdapat empat variabel bebas dengan koefisien 63,1%, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mencari 36,9% variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti kepadatan penduduk dan pendapatan perkapita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, Zia, dan Suwardi. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SILPA, dan luas wilayah terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 8, 1-18.
- Ayem, Sri, dan Dessy. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 2, No. 2, 169-182.
- Badan Pusat Statistika. “laju pertumbuhan PDB/ PDRB”. [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id). <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/3>. (Diakses pada Januari 26, 2021)
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. “Belanja modal”. [djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal>. (Diakses pada Januari 26, 2021).
- (2018). *Ringkasan APBD 2018*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- “SILPA”. [djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). [www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2). (Diakses pada Januari 11, 2021).
- “Sumber-sumber pendapatan daerah”. [djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>. (Diakses pada Januari 26, 2021).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. (Edisi 9. Cetakan ke-9) Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Sahmudin, dan Arifuddin. (2007). *Akuntansi sektor publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Muhammad, dan Azis. (2018). *Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat*. Makasar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.
- Kasdy Laila, Nardisyah, dan Heru. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal dan implikasinya pada realisasi belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4, No. 1, 1-18.

- Kosim, Engkos. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Banjar. *Journal Of Management Review*. Vol. 1, No. 1, 13-23.
- Kurniawansyah, Deddy, Sigit .K. dan Firdaus A.R. (2018). Teori agency dalam pemikiran organisasi ; pendekatan positivist dan principle-agen. *JRABA (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga)*. Vol. 3, No. 2, 435-446.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. (2012). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. 15.
- Talluta, Dessyana, Rossy Lambelanova, dan Ella Wargadinata. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan SILPA terhadap belanja modal dan dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahan Bhakti Praja*. Vol. 8, No. 1, 43-66.
- Maulana, Ilham, Endang Masitoh, dan Riana R Dewi. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 15, No. 1, 12-19.
- Nelsari Yois dan Delyanti Azzumarito. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara. *EKOMBIS sains (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis)*. Vol. 4, No. 2, 121-128.
- Nurlis. (2016). The factors affecting of the capital expenditure allocation case: The Local Government of Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 7, No. 1, 107-113.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Rahmadewi, Diana. (2018). Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, penerimaan pembiayaan, dan realisasi belanja modal Provinsi Bengkulu. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*. Vol. 5, No. 1, 108-118.

Rahmayati, Anim. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Gerbang Media.

Sari Desak Gede Yudi Atika, Putu Kepramareni, Dan Ni Luh Gde Novitasari. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal KRISNA (Kumpulan Riset Akuntansi)*. Vol. 9, No. 1, 15-29.

Sari, Nurmala, Gustian dan Sarwani. (2018). Pengaruh dana perimbangan dana sisa lebih pembiayaan perhitungan anggaran (SILPA) dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. *JRMB (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis)*. Vol. 03, No. 1, 91-100.

Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syukri Muhammad dan Hinaya. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA (Jurnal Of Economic, Management And Accounting)*. Vol. 2, No. 2, 30-37.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wibisono, Nurharibnu dan Arini Wildaniati. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, SILPA dan luas wilayah terhadap alokasi anggaran belanja modal. *EKOMAKS (Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. Vol. 5, No. 2, 11-20.

Widiasmara, Anny. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, total asset dan luas wilayah, terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable moderating. *JIFA (Journal Of Islamic Finance And Accounting)*. Vol. 2, No. 1, 45-56.

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

NO	Bulan Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X	X	X	X																				
2	Konsultasi	X			X									X		X	X	X							X				
3	Revisi Proposal													X	X	X	X												
4	Pengumpulan Data									X	X																		
5	Analisis Data																					X	X						
6	Penulisan akhir naskah skripsi																							X					
7	Pendaftaran munaqosah																							X					
8	Munaqosah																								X				
9	Revisi Skripsi																									X			



Lampiran 2

Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal 2015-2019

Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal 2015

<b>Provinsi</b>	<b>PAD</b>	<b>SILPA</b>	<b>LW</b>	<b>PE</b>	<b>BM</b>
Aceh	4.203.042.379.720	4.860.285.141.652	57 956	-1	8.553.029.956.237
Sumatera Utara	8.749.673.161.229	7.357.776.411.634	72 981,23	5	8.751.097.042.502
Sumatera Bara	3.455.962.733.432	5.211.591.012.553	42 012,89	5	4.213.261.487.465
Riau	5.603.073.876.468	15.161.137.453.456	87 023,66	0	8.551.808.703.394
Jambi	2.180.596.717.822	2.363.069.927.394	50.058,16	4	3.532.592.464.845
Sumatera Selatan	4.622.506.211.786	2.374.827.586.937	91.592,43	4	6.940.538.153.668
Bengkulu	1.119.476.505.515	1.810.394.555.118	19.919,33	5	2.360.152.629.815
Lampung	3.523.997.366.420	2.869.303.999.149	34.623,80	5	4.466.006.171.602
Kepulauan Bangka Belitung	1.196.299.643.481	2.300.698.755.940	16.424,06	4	1.749.322.244.148
Kepulauan Riau	2.592.840.880.262	784.919.877.724	8.201,72	6	1.662.441.193.338
DKI Jakarta	33.686.176.815.708	14.094.417.060.983	664,01	6	10.244.016.709.208
Jawa Barat	32.191.204.121.169	28.165.464.438.142	35 377,76	5	17.859.907.919.269
Jawa Tengah	20.698.442.504.086	23.074.250.203.401	32.800,69	5	13.019.978.420.273
D.I. Yogyakarta	3.504.335.435.070	3.785.117.187.847	3.133,15	5	2.109.891.313.017
Jawa Timur	29.976.414.461.165	27.584.286.015.701	47.799,75	5	18.679.208.347.885
Banten	11.259.988.202.975	11.245.432.360.829	9.662,92	5	6.363.907.842.490
Bali	8.419.255.791.254	6.405.163.123.389	5 780,06	6	2.835.910.177.655
Nusa Tenggara Barat	2.630.448.212.987	1.682.922.439.316	18 572,32	22	3.158.411.360.480

Nusa Tenggara Timur	2.047.669.079.020	5.524.275.979.559	48 718,10	5	4.382.445.392.169
Kalimantan Barat	2.903.988.131.239	2.646.996.489.256	147 307	5	4.555.772.948.418
Kalimantan Tengah	2.069.935.333.093	4.563.474.538.390	153 564,50	7	5.089.588.415.621
Kalimantan Selatan	4.251.197.988.433	7.426.821.119.404	38 744,23	4	6.080.305.682.903
Kalimantan Timur	7.044.938.252.926	9.756.447.674.091	129 066,64	-1	13.080.301.188.145
Kalimantan Utara	778.910.003.473	5.711.643.910.370	75 467,70	3	2.820.994.620.900
Sulawesi Utara	1.825.355.634.259	2.914.179.545.087	13 851,64	6	3.548.218.976.287
Sulawesi Tengah	1.809.611.071.238	1.726.064.300.262	61.841,29	15	3.300.966.242.768
Sulawesi Selatan	6.202.953.762.229	5.123.776.715.111	46.717,48	7	7.547.112.146.471
Sulawesi Tenggara	1.809.611.071.238	2.579.574.876.380	38.067,70	7	4.421.643.132.017
Gorontalo	715.535.685.160	937.642.653.681	11.257,07	6	1.320.677.311.097
Sulawesi Barat	538.333.489.641	543.213.413.474	16.787,18	7	1.807.025.492.522
Maluku	782.131.712.792	2.567.042.998.881	46 914,03	5	2.908.515.780.563
Maluku Utara	586.216.968.582	638.314.601.767	31 982,50	6	2.456.712.887.703
Papua	2.162.126.180.433	8.989.922.924.579	319 036,05	7	13.639.230.366.433
Papua Barat	767.682.028.642	4.477.990.709.679	99 671,63	4	6.642.714.669.100

Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal 2016

<b>Provinsi</b>	<b>PAD</b>	<b>SILPA</b>	<b>LW</b>	<b>PE</b>	<b>BM</b>
Aceh	4.718.255.533.549	2.205.303.278.288	57 956	3	9.870.070.000.000
Sumatera Utara	9.136.809.378.527	4.020.049.116.894	72 981,23	5	9.788.058.000.000
Sumatera Bara	3.646.986.353.089	2.714.366.029.080	42 012,89	5	5.187.401.569.091
Riau	4.954.749.728.353	4.994.266.841.136	87 023,66	2	6.285.251.000.000
Jambi	2.227.594.636.423	877.581.218.982	50.058,16	4	4.034.763.098.131
Sumatera Selatan	4.738.876.797.602	560.883.268.774	91.592,43	5	6.727.451.000.000
Bengkulu	1.241.133.544.983	764.457.487.898	19.919,33	5	2.608.936.000.000
Lampung	3.805.129.098.701	1.197.046.241.450	34.623,80	5	5.655.416.000.000
Kepulauan Bangka Belitung	1.240.541.242.794	1.065.705.500.498	16.424,06	4	1.928.419.000.000
Kepulauan Riau	2.798.971.265.923	139.186.525.957	8.201,72	5	1.962.838.161.467
DKI Jakarta	36.888.019.000.000	4.933.520.000.000	664,01	6	8.965.470.000.000
Jawa Barat	34.660.152.281.377	13.994.731.288.101	35 377,76	6	19.959.613.000.000
Jawa Tengah	22.747.773.353.248	11.800.283.000.000	32.800,69	5	17.234.138.000.000
D.I. Yogyakarta	3.722.411.011.275	1.673.364.000.000	3 133,15	5	2.219.095.000.000
Jawa Timur	31.230.643.537.946	13.447.725.233.245	47.799,75	6	20.541.364.000.000
Banten	12.242.866.552.086	5.442.393.000.000	9.662,92	5	6.687.277.000.000
Bali	9.128.661.932.528	2.925.876.000.000	5 780,06	6	4.085.349.000.000
Nusa Tenggara Barat	2.804.140.647.268	947.440.978.976	18 572,32	6	3.650.425.000.000
Nusa Tenggara Timur	2.284.286.105.727	2.751.769.244.792	48 718,10	5	5.478.738.000.000
Kalimantan Barat	3.010.649.898.641	1.337.060.976.555	147 307	5	5.483.468.000.000
Kalimantan Tengah	2.128.836.888.491	1.946.627.270.552	153 564,50	6	5.271.949.000.000
Kalimantan Selatan	4.145.204.673.107	3.224.537.295.072	38 744,23	4	6.408.490.000.000
Kalimantan Timur	6.548.618.821.415	1.972.623.110.741	129 066,64	0	7.054.839.000.000

Kalimantan Utara	817.601.563.133	1.550.299.939.495	75 467,70	4	2.409.105.000.000
Sulawesi Utara	1.866.965.201.835	1.459.327.754.430	13 851,64	6	4.285.032.000.000
Sulawesi Tengah	1.935.868.925.385	830.476.239.675	61.841,29	10	4.063.140.000.000
Sulawesi Selatan	6.981.020.678.402	2.663.167.682.498	46.717,48	7	9.477.571.000.000
Sulawesi Tenggara	1.935.868.925.385	1.453.661.115.144	38.067,70	7	5.385.433.000.000
Gorontalo	807.252.869.084	454.780.676.612	11.257,07	7	1.361.536.000.000
Sulawesi Barat	593.438.148.873	231.530.782.189	16.787,18	6	2.231.088.000.000
Maluku	989.172.080.922	1.301.861.386.279	46 914,03	6	3.482.122.000.000
Maluku Utara	597.415.931.966	316.502.690.364	31 982,50	6	2.875.836.000.000
Papua	2.417.132.730.040	3.346.549.439.567	319 036,05	9	12.536.710.000.000
Papua Barat	847.074.856.744	1.422.805.159.496	99 671,63	5	5.954.414.000.000

Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal 2017

<b>Provinsi</b>	<b>PAD</b>	<b>SILPA</b>	<b>LW</b>	<b>PE</b>	<b>BM</b>
Aceh	4.956.144.333.450	1.663.924.980.684	57.956	4	8.920.152.433.726
Sumatera Utara	10.732.002.100.318	4.335.209.988.440	72.981,23	5	10.887.110.458.913
Sumatera Bara	4.663.164.844.922	1.857.560.691.799	42.012,89	5	5.126.246.643.786
Riau	6.299.532.077.281	1.905.591.176.624	87.023,66	3	6.133.989.294.402
Jambi	2.859.652.827.725	872.186.682.257	50.058,16	5	3.913.989.700.138
Sumatera Selatan	6.092.481.549.883	423.775.568.284	91.592,43	6	7.640.391.092.323
Bengkulu	1.464.272.942.212	937.265.881.110	19.919,33	5	2.446.442.323.430
Lampung	4.524.757.695.993	976.090.797.209	34.623,80	5	6.474.510.558.497
Kepulauan Bangka Belitung	1.643.273.166.801	614.362.756.783	16.424,06	4	1.606.903.474.055
Kepulauan Riau	3.013.883.337.659	801.234.662.831	8.201,72	2	2.105.388.407.318
DKI Jakarta	43.901.488.807.742	7.706.289.336.723	664,01	6	11.045.723.233.626
Jawa Barat	41.400.147.753.819	9.982.873.058.061	35.377,76	5	18.525.802.185.835
Jawa Tengah	26.945.325.899.152	8.114.730.224.513	32.800,69	5	16.075.267.331.121
D.I. Yogyakarta	4.349.902.284.875	1.172.551.146.918	3.133,15	5	2.709.902.251.800
Jawa Timur	37.263.120.085.230	10.030.606.042.118	47.799,75	5	20.224.426.323.066
Banten	14.711.439.834.884	4.128.763.671.794	9.662,92	6	7.114.905.041.909
Bali	10.737.300.643.693	2.346.437.708.730	5.780,06	6	3.974.131.490.800
Nusa Tenggara Barat	3.994.325.500.645	1.386.255.385.288	18.572,32	0	4.628.111.057.009
Nusa Tenggara Timur	3.062.236.368.256	2.007.499.879.106	48.718,10	5	5.040.317.422.630
Kalimantan Barat	3.888.720.866.323	851.350.514.704	147.307	5	5.466.269.672.639
Kalimantan Tengah	2.741.702.831.483	2.094.286.702.831	153.564,50	7	4.588.430.989.775
Kalimantan Selatan	4.869.696.450.648	2.957.717.545.514	38.744,23	5	5.033.993.424.779
Kalimantan Timur	7.048.343.043.176	2.800.589.331.160	129.066,64	3	5.342.672.347.317

Kalimantan Utara	826.825.626.490	1.011.242.469.421	75.467,70	7	1.964.511.092.476
Sulawesi Utara	2.277.757.227.512	885.239.483.423	13.851,64	6	3.986.209.211.749
Sulawesi Tengah	2.428.170.892.825	706.016.641.024	61.841,29	7	3.798.582.096.221
Sulawesi Selatan	8.354.954.309.878	2.219.855.741.452	46.717,48	7	8.644.309.010.854
Sulawesi Tenggara	2.428.170.892.825	1.406.801.198.213	38.067,70	7	4.810.395.702.333
Gorontalo	1.018.447.095.356	460.080.493.532	11.257,07	7	1.270.253.618.603
Sulawesi Barat	805.496.860.755	107.589.158.991	16.787,18	6	1.977.587.503.971
Maluku	926.924.844.753	1.115.118.469.213	46.914,03	6	3.223.993.362.942
Maluku Utara	845.989.353.684	258.171.304.818	31.982,50	8	2.666.745.240.060
Papua	2.480.745.802.658	3.663.610.410.740	319.036,05	5	9.608.319.913.428
Papua Barat	990.126.651.744	1.368.720.567.742	102.955,15	4	4.676.730.534.022

Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal 2018

<b>Provinsi</b>	<b>PAD</b>	<b>SILPA</b>	<b>LW</b>	<b>PE</b>	<b>BM</b>
Aceh	4.930.608.199.586,03	2.741.317.836.749,80	57.956	5	6.320.934.306.641,18
Sumatera Utara	10.854.634.049.847,60	3.152.692.655.375,14	72.981,23	5	9.685.225.703.372,78
Sumatera Bara	4.288.003.233.939,99	1.778.507.216.795,22	42.012,89	5	4.963.457.129.442,89
Riau	6.112.337.021.174,67	361.530.413.748,03	87.023,66	2	4.601.158.198.347,71
Jambi	2.868.763.218.312,76	1.472.924.632.559,78	50.058,16	5	3.675.246.806.524,42
Sumatera Selatan	6.266.511.732.635,90	732.686.311.758,07	91.592,43	6	7.868.765.551.561,50
Bengkulu	1.598.698.888.398,40	862.469.154.774,77	19.919,33	5	2.029.481.868.852,92
Lampung	4.605.336.014.737,60	805.533.388.586,04	34.623,80	5	6.167.262.319.742,57
Kepulauan Bangka Belitung	1.687.214.510.140,54	733.350.608.388,53	16.424,06	4	1.597.647.834.743,36
Kepulauan Riau	3.214.701.042.040,67	586.132.953.026,05	8.201,72	5	2.272.244.123.409,44
DKI Jakarta	43.327.136.602.811	13.165.646.901.882	664,01	6	14.118.608.087.643
Jawa Barat	40.240.461.574.775,20	9.612.536.205.572,33	35.377,76	6	17.810.839.326.671
Jawa Tengah	26.766.784.398.718,80	8.358.405.926.921,55	32.800,69	5	15.532.094.789.187,20
D.I. Yogyakarta	4.503.175.499.457,92	1.485.441.711.671,86	3.133,15	6	2.852.649.889.515,94
Jawa Timur	37.086.323.128.966,40	12.261.067.252.884,80	47.799,75	5	18.572.375.454.386,40
Banten	14.673.802.588.143,90	4.272.715.426.330,79	9.662,92	6	6.926.218.526.671,74
Bali	11.319.551.436.745,70	2.124.593.472.590,20	5.780,06	6	3.146.078.825.578,52
Nusa Tenggara Barat	3.250.587.680.929,03	1.283.596.681.718,80	18.572,32	-4	4.021.320.269.801,43
Nusa Tenggara Timur	2.508.530.899.272,31	1.769.772.291.244,38	48.718,10	5	4.802.603.118.595,86
Kalimantan Barat	4.035.132.985.960,48	875.692.934.401,21	147.307	5	4.803.787.159.573,36
Kalimantan Tengah	2.884.500.351.442,59	2.255.082.768.420,40	153.564,50	6	4.734.981.016.843,99
Kalimantan Selatan	5.461.533.458.277,36	1.861.289.949.231,75	38.744,23	5	4.531.484.439.998,17
Kalimantan Timur	8.138.182.348.481,17	2.479.380.203.318,81	129.066,64	3	7.535.200.532.785,36

Kalimantan Utara	917.854.396.892,26	380.477.334.066,99	75.467,70	6	1.653.248.144.832,11
Sulawesi Utara	2.269.836.015.568,47	1.233.337.835.096,78	13.851,64	6	3.436.726.186.172,26
Sulawesi Tengah	2.284.473.207.967,39	712.008.964.410,91	61.841,29	6	3.357.720.641.387,85
Sulawesi Selatan	8.225.243.402.729,28	1.703.934.007.611,97	46.717,48	7	7.900.654.516.880,88
Sulawesi Tenggara	2.284.473.207.967,39	884.576.784.502,57	38.067,70	6	4.529.835.999.573,95
Gorontalo	949.712.893.387,03	427.490.651.252,98	11.257,07	7	1.325.657.686.968,94
Sulawesi Barat	718.911.131.164,03	180.474.622.811,87	16.787,18	6	1.666.155.222.741,32
Maluku	1.013.416.884.844,23	853.923.897.718,53	46.914,03	6	3.193.262.729.264,57
Maluku Utara	841.298.348.011,38	258.586.195.173,07	31.982,50	8	2.583.213.456.149,99
Papua	2.389.990.769.108,11	2.596.768.546.933,71	319.036,05	7	10.129.634.544.777
Papua Barat	937.411.606.905,04	1.682.401.712.710,82	102.955,15	6	5.297.010.041.828,59



Tabel PAD, SILPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal 2019

<b>Provinsi</b>	<b>PAD</b>	<b>SILPA</b>	<b>LW</b>	<b>PE</b>	<b>BM</b>
Aceh	5.549.650.497.816	4.388.887.097.157	57.956	4	8.743.706.878.420
Sumatera Utara	11.312.405.397.369	3.345.686.499.574	72.981,23	5	9.604.460.141.357
Sumatera Bara	4.426.443.171.491	1.540.982.358.331	42.012,89	5	5.232.857.860.211
Riau	6.176.293.529.616	1.773.642.920.677	87.023,66	3	6.202.050.638.524
Jambi	2.949.171.896.837	1.934.319.043.873	50.058,16	4	4.513.781.978.565
Sumatera Selatan	6.645.691.889.432	2.500.505.787.211	91.592,43	6	10.348.288.852.549
Bengkulu	1.527.820.162.205	695.831.937.824	19.919,33	5	2.467.318.683.159
Lampung	5.086.189.902.931	1.062.040.111.526	34.623,80	5	4.528.492.514.920
Kepulauan Bangka Belitung	1.634.944.581.695	1.044.838.772.803	16.424,06	3	1.821.602.746.961
Kepulauan Riau	3.467.482.175.151	777.838.959.114	8.201,72	5	2.777.802.387.325
DKI Jakarta	45.707.400.003.802	9.755.082.722.776	664,01	6	11.551.927.779.590
Jawa Barat	44.150.909.128.074	9.617.861.475.802	35.377,76	5	19.634.115.492.738
Jawa Tengah	28.648.041.587.526	8.171.718.911.092	32.800,69	5	15.513.378.776.354
D.I. Yogyakarta	4.742.511.857.430	1.724.891.148.896	3.133,15	7	3.066.603.623.327
Jawa Timur	39.344.673.330.873	18.611.985.530.268	47.803,49	6	21.119.933.351.888
Banten	15.763.020.820.183	3.858.999.427.260	9.662,92	6	6.871.902.883.245
Bali	12.305.573.383.537	1.643.424.587.819	5.780,06	6	3.038.863.397.359
Nusa Tenggara Barat	3.598.012.440.502	918.479.967.927	18.572,32	4	3.598.012.440.502
Nusa Tenggara Timur	2.844.072.457.605	1.575.204.231.432	48.718,10	5	5.292.957.496.538
Kalimantan Barat	4.179.910.991.507	1.418.867.903.543	147.307	5	5.091.935.409.722
Kalimantan Tengah	3.212.108.868.621	2.398.702.011.767	153.564,50	6	4.840.842.203.046
Kalimantan Selatan	5.650.042.071.643	3.235.759.689.672	38.744,23	4	5.789.957.260.054
Kalimantan Timur	9.537.631.021.216	4.856.848.651.334	129.066,64	5	9.344.153.305.899

Kalimantan Utara	1.057.174.516.728	404.601.668.275	75.467,70	7	1.538.005.054.918
Sulawesi Utara	2.380.359.117.981	1.150.808.857.015	13.892,47	6	3.268.379.395.902
Sulawesi Tengah	2.475.587.030.499	1.059.474.490.915	61.841,29	7	4.273.366.469.231
Sulawesi Selatan	8.774.005.120.520	1.336.316.091.138	46.717,48	7	7.824.076.937.256
Sulawesi Tenggara	2.063.338.188.987	1.073.271.272.950	38.067,70	7	5.241.616.297.858
Gorontalo	1.047.309.342.653	356.353.297.110	11.257,07	6	1.338.816.131.401
Sulawesi Barat	773.573.551.035	223.589.475.023	16.787,18	6	1.834.565.392.670
Maluku	1.045.205.236.762	560.079.648.693	46.914,03	6	2.842.287.338.222
Maluku Utara	990.258.909.347	264.630.401.778	31.982,50	6	3.194.091.840.194
Papua	3.496.501.051.904	3.835.222.100.363	319.036,05	-16	9.839.848.666.772
Papua Barat	1.096.241.229.466	2.059.589.969.082	102.955,15	3	6.223.660.106.814

Lampiran 3

Tabel Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

Tabel Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015

Provinsi	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah
Aceh	1.477.984.982.946	305.550.769.394	250.564.069.848	2.168.942.557.532	4.203.042.379.720
Sumut	6.315.380.665.500	733.707.946.591	453.533.593.382	1.247.050.955.756	8.749.673.161.229
Sumbar	1.877.235.643.314	248.217.474.449	222.816.942.127	1.107.692.673.542	3.455.962.733.432
Riau	3.325.623.919.340	234.657.184.078	514.372.004.949	1.528.420.768.101	5.603.073.876.468
Jambi	1.318.147.225.865	176.170.868.507	98.983.861.776	587.294.761.674	2.180.596.717.822
Sumsel	3.262.696.660.692	176.552.093.776	154.569.193.668	1.028.688.263.650	4.622.506.211.786
Bengkulu	622.261.070.879	44.825.179.989	47.113.591.387	405.276.663.260	1.119.476.505.515
Lampung	2.445.296.180.048	107.442.682.877	78.309.051.574	892.949.451.921	3.523.997.366.420
Kep. Bangka	740.971.074.857	74.897.102.452	32.017.415.395	348.414.050.777	1.196.299.643.481
Kep. Riau	2.082.880.997.904	121.393.715.769	36.415.780.267	352.150.386.322	2.592.840.880.262
DKI Jakarta	29.076.926.598.506	459.459.498.063	527.280.486.037	3.622.510.233.102	33.686.176.815.708
Jabar	23.704.114.149.023	1.114.046.216.930	619.421.407.765	6.753.622.347.451	32.191.204.121.169
Jateng	12.186.848.369.881	895.269.055.605	625.908.709.486	6.990.416.369.114	20.698.442.504.086
D.I.Y	2.259.940.658.983	188.787.495.669	139.270.333.910	916.336.946.508	3.504.335.435.070
Jatim	19.028.541.412.118	1.750.633.245.022	760.749.111.396	8.436.490.692.629	29.976.414.461.165
Banten	8.926.148.645.372	635.294.664.638	162.924.832.263	1.535.620.060.702	11.259.988.202.975

Bali	6.462.206.986.816	385.794.153.633	340.857.174.058	1.230.397.476.747	8.419.255.791.254
NTB	1.379.311.849.156	193.580.646.273	148.815.203.846	908.740.513.712	2.630.448.212.987
NTT	929.599.647.803	196.403.274.108	215.325.566.262	706.340.590.847	2.047.669.079.020
Kalbar	1.971.729.439.040	249.069.259.579	137.336.256.358	545.853.176.262	2.903.988.131.239
Kalteng	1.268.967.748.117	125.399.030.511	99.161.071.039	576.407.483.426	2.069.935.333.093
Kalsel	2.495.797.501.082	144.796.650.542	162.914.181.470	1.447.689.655.339	4.251.197.988.433
Kaltim	4.649.500.159.710	174.584.136.547	354.114.632.891	1.866.739.323.778	7.044.938.252.926
Kalut	382.057.833.166	19.414.470.554	44.229.810.699	333.207.889.054	778.910.003.473
Sulut	1.203.910.930.912	209.070.260.526	48.139.844.562	364.234.598.259	1.825.355.634.259
Sulteng	958.017.553.707	166.829.962.863	52.315.126.933	632.448.427.735	1.809.611.071.238
Sulsel	4.114.264.489.000	663.183.169.931	234.871.895.006	1.190.634.208.292	6.202.953.762.229
Sultra	678.246.961.054	141.788.761.788	82.124.259.966	374.065.253.187	1.276.225.235.995
Gorontalo	334.553.314.185	32.374.919.958	20.157.896.314	328.449.554.703	715.535.685.160
Sulbar	280.373.078.161	67.523.747.192	16.017.128.302	174.419.535.986	538.333.489.641
Maluku	418.126.201.305	166.335.436.314	2.614.475.944	195.055.599.229	782.131.712.792
Malut	253.859.560.210	139.478.706.303	1.176.231.200	191.702.470.869	586.216.968.582
Papua	1.080.855.281.556	266.469.457.978	55.783.443.721	759.017.997.178	2.162.126.180.433
Papua Barat	316.264.210.125	59.547.658.112	20.622.420.759	371.247.739.646	767.682.028.642

Tabel Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2016

Provinsi	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah
Aceh	1.728.343.157.678,07	252.141.734.857,96	281.591.045.905	2.668.532.261.145	4.930.608.199.586
Sumut	7.874.225.907.621,18	391.165.303.508,16	510.778.646.715	2.078.464.192.003,28	10.854.634.049.848
Sumbar	2.483.397.845.231,99	180.373.668.984,90	223.284.945.142,87	1.400.946.774.580,23	4.288.003.233.940
Riau	4.264.739.835.946,83	168.737.299.343,44	328.109.202.687,53	1.350.750.683.196,87	6.112.337.021.175
Jambi	1.882.586.807.715,33	99.127.440.627,54	114.808.096.819,10	772.240.873.150,79	2.868.763.218.313
Sumsel	4.479.562.479.360,04	148.255.458.616,91	221.515.003.024,38	1.417.178.791.634,57	6.266.511.732.636
Bengkulu	865.300.333.541,37	31.419.634.569,19	40.370.653.335,76	661.608.266.952,08	1.598.698.888.398
Lampung	3.389.860.875.709,77	91.954.760.711,59	91.099.574.517,13	1.032.420.803.799,11	4.605.336.014.738
Kep. Bangka	1.200.703.446.703,13	59.863.774.054,52	33.955.551.632,04	392.691.737.750,85	1.687.214.510.141
Kep. Riau	2.558.245.766.594,16	131.629.216.582,93	45.897.089.720	478.928.969.143,58	3.214.701.042.041
DKI Jakarta	37.538.912.327.312	578.555.603.994	592.956.276.353	4.616.712.395.152	43.327.136.602.811
Jabar	30.915.271.414.106,27	1.059.627.518.282	679.559.321.165	7.586.003.321.221,95	40.240.461.574.775
Jateng	16.464.014.802.226	952.511.893.715,71	995.941.296.112	8.354.316.406.665,17	26.766.784.398.719
D.I.Y	3.014.263.419.958,44	215.095.738.163,30	196.286.333.492,38	1.077.530.007.843,80	4.503.175.499.458
Jatim	24.425.323.713.605,24	1.435.946.292.987,23	820.046.238.903,13	10.405.006.883.470,82	37.086.323.128.966
Banten	11.993.270.649.747,25	396.753.432.576,04	174.677.898.016	2.109.100.607.804,68	14.673.802.588.144
Bali	8.846.064.463.424,17	378.805.650.451,20	512.879.249.534,86	1.581.802.073.335,55	11.319.551.436.746
NTB	1.805.812.620.395,12	178.702.178.752,32	148.179.632.016,33	1.117.893.249.765,26	3.250.587.680.929
NTT	1.268.510.896.105,19	226.276.466.469,25	217.739.670.564	796.003.866.133,87	2.508.530.899.272
Kalbar	2.875.511.704.231,69	135.034.655.416,97	171.608.457.890,63	852.978.168.421,19	4.035.132.985.960

Kalteng	1.808.428.563.533,88	101.860.687.133,84	170.018.429.725	804.192.671.049,87	2.884.500.351.443
Kalsel	3.568.805.677.568,03	141.125.376.772,50	183.651.622.936,41	1.567.950.781.000,42	5.461.533.458.277
Kaltim	5.927.888.130.351,16	170.961.505.289,28	313.591.149.808,89	1.725.741.563.031,84	8.138.182.348.481
Kalut	497.315.427.235,15	31.510.075.476,02	55.906.558.135,58	333.122.336.045,51	917.854.396.892
Sulut	1.582.107.785.066	263.437.971.214,82	76.480.926.777	347.809.332.510,65	2.269.836.015.568
Sulteng	1.168.773.050.943,91	171.895.557.918,19	38.518.548.623	905.286.050.482,29	2.284.473.207.967
Sulsel	5.265.861.908.541,40	463.809.618.692,30	350.423.657.920,44	2.145.148.217.575,14	8.225.243.402.729
Sultra	928.036.067.488	98.950.535.595,91	131.177.888.269	619.170.585.988,03	1.777.335.077.341
Gorontalo	475.543.500.710	49.101.420.799,50	26.460.503.842	398.607.468.035,53	949.712.893.387
Sulbar	350.519.449.856,58	84.535.772.616,70	22.977.703.558,50	260.878.205.132,25	718.911.131.164
Maluku	537.008.362.576,74	182.498.002.754,23	250.000.000	293.660.519.513,26	1.013.416.884.844
Malut	389.261.894.406,81	98.651.314.477	3.343.185.908,53	350.041.953.219,04	841.298.348.011
Papua	1.305.619.167.572,87	184.715.257.421,25	44.447.705.615	855.208.638.498,99	2.389.990.769.108
Papua Barat	497.630.567.375,48	45.586.313.771	20.695.225.111,10	373.499.500.647,46	937.411.606.905

Tabel Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017

Provinsi	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah
Aceh	1.717.133.332.163	278.077.601.396	275.510.444.681	2.685.422.955.210	4.956.144.333.450
Sumut	7.480.760.102.287	500.659.273.504	463.657.251.925	2.286.925.472.602	10.732.002.100.318
Sumbar	2.232.707.066.983	186.211.919.668	253.119.396.967	1.991.126.461.304	4.663.164.844.922
Riau	3.855.941.738.405	178.552.435.025	295.712.416.415	1.969.325.487.436	6.299.532.077.281
Jambi	1.748.077.434.239	116.477.886.397	104.770.632.705	890.326.874.384	2.859.652.827.725
Sumsel	3.998.668.605.665	144.188.328.559	185.542.177.417	1.764.082.438.242	6.092.481.549.883
Bengkulu	753.628.302.107	34.632.534.259	44.051.843.466	631.960.262.380	1.464.272.942.212
Lampung	3.172.169.947.401	77.734.119.151	86.904.613.898	1.187.949.015.543	4.524.757.695.993
Kep. Bangka	1.026.762.318.178	57.364.688.956	36.097.169.853	523.048.989.814	1.643.273.166.801
Kep. Riau	2.244.783.766.122	119.708.551.922	46.420.527.860	602.970.491.755	3.013.883.337.659
DKI Jakarta	36.500.782.266.176	624.137.343.759	489.478.684.673	6.287.090.513.134	43.901.488.807.742
Jabar	28.559.914.810.931	1.137.761.668.670	693.404.389.159	11.009.066.885.059	41.400.147.753.819
Jateng	15.003.412.067.198	900.482.120.556	963.167.864.359	10.078.263.847.039	26.945.325.899.152
D.I.Y	2.794.854.122.542	202.518.713.335	185.816.628.288	1.166.712.820.710	4.349.902.284.875
Jatim	23.077.820.541.569	1.666.171.857.662	788.276.065.644	11.730.851.620.355	37.263.120.085.230
Banten	11.282.729.085.266	368.036.247.993	167.488.204.675	2.893.186.296.950	14.711.439.834.884
Bali	8.001.725.018.857	360.259.293.148	555.374.995.330	1.819.941.336.358	10.737.300.643.693
NTB	1.740.978.603.424	178.574.907.651	402.427.655.626	1.672.344.333.944	3.994.325.500.645
NTT	1.168.210.326.869	194.853.175.066	206.706.820.145	1.492.466.046.176	3.062.236.368.256
Kalbar	2.431.176.825.323	149.335.914.226	152.991.099.663	1.155.217.027.111	3.888.720.866.323
Kalteng	1.635.035.954.994	100.842.354.322	145.970.677.901	859.853.844.266	2.741.702.831.483

Kalsel	2.862.325.226.543	138.410.766.735	167.068.899.160	1.701.891.558.210	4.869.696.450.648
Kaltim	4.669.926.493.728	166.903.741.395	324.985.063.222	1.886.527.744.831	7.048.343.043.176
Kalut	412.068.462.423	24.958.875.446	49.087.579.571	340.710.709.050	826.825.626.490
Sulut	1.477.823.044.613	254.719.289.832	45.413.292.477	499.801.600.590	2.277.757.227.512
Sulteng	1.106.877.883.055	190.881.746.229	40.798.093.315	1.089.613.170.226	2.428.170.892.825
Sulsel	4.979.582.448.938	450.728.498.692	380.717.844.698	2.543.925.517.550	8.354.954.309.878
Sultra	845.466.388.925	100.424.205.364	117.796.729.505	850.628.503.119	1.914.315.826.913
Gorontalo	423.797.007.536	41.039.849.664	16.634.046.803	536.976.191.353	1.018.447.095.356
Sulbar	326.816.613.366	86.547.883.154	23.356.920.995	368.775.443.240	805.496.860.755
Maluku	476.250.534.687	149.523.816.990	946.198.353	300.204.294.723	926.924.844.753
Malut	350.263.087.240	163.698.839.898	3.195.123.069	328.832.303.477	845.989.353.684
Papua	1.301.671.885.093	242.967.804.815	5.716.251.774	930.389.860.976	2.480.745.802.658
Papua Barat	441.261.516.093	49.444.687.245	3.614.583.329	495.805.865.077	990.126.651.744



Tabel Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018

Provinsi	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah
Aceh	1.728.343.157.678,07	252.141.734.857,96	281.591.045.905,00	2.668.532.261.145,00	4.930.608.199.586
Sumut	7.874.225.907.621,18	391.165.303.508,16	510.778.646.715,00	2.078.464.192.003,28	10.854.634.049.848
Sumbar	2.483.397.845.231,99	180.373.668.984,90	223.284.945.142,87	1.400.946.774.580,23	4.288.003.233.940
Riau	4.264.739.835.946,83	168.737.299.343,44	328.109.202.687,53	1.350.750.683.196,87	6.112.337.021.175
Jambi	1.882.586.807.715,33	99.127.440.627,54	114.808.096.819,10	772.240.873.150,79	2.868.763.218.313
Sumsel	4.479.562.479.360,04	148.255.458.616,91	221.515.003.024,38	1.417.178.791.634,57	6.266.511.732.636
Bengkulu	865.300.333.541,37	31.419.634.569,19	40.370.653.335,76	661.608.266.952,08	1.598.698.888.398
Lampung	3.389.860.875.709,77	91.954.760.711,59	91.099.574.517,13	1.032.420.803.799,11	4.605.336.014.738
Kep. Bangka	1.200.703.446.703,13	59.863.774.054,52	33.955.551.632,04	392.691.737.750,85	1.687.214.510.141
Kep. Riau	2.558.245.766.594,16	131.629.216.582,93	45.897.089.720,00	478.928.969.143,58	3.214.701.042.041
DKI Jakarta	37.538.912.327.312,00	578.555.603.994,00	592.956.276.353,00	4.616.712.395.152,00	43.327.136.602.811
Jabar	30.915.271.414.106,27	1.059.627.518.282,00	679.559.321.165,00	7.586.003.321.221,95	40.240.461.574.775
Jateng	16.464.014.802.226,00	952.511.893.715,71	995.941.296.112,00	8.354.316.406.665,17	26.766.784.398.719
D.I.Y	3.014.263.419.958,44	215.095.738.163,30	196.286.333.492,38	1.077.530.007.843,80	4.503.175.499.458
Jatim	24.425.323.713.605,24	1.435.946.292.987,23	820.046.238.903,13	10.405.006.883.470,82	37.086.323.128.966
Banten	11.993.270.649.747,25	396.753.432.576,04	174.677.898.016,00	2.109.100.607.804,68	14.673.802.588.144
Bali	8.846.064.463.424,17	378.805.650.451,20	512.879.249.534,86	1.581.802.073.335,55	11.319.551.436.746
NTB	1.805.812.620.395,12	178.702.178.752,32	148.179.632.016,33	1.117.893.249.765,26	3.250.587.680.929
NTT	1.268.510.896.105,19	226.276.466.469,25	217.739.670.564,00	796.003.866.133,87	2.508.530.899.272

Kalbar	2.875.511.704.231,69	135.034.655.416,97	171.608.457.890,63	852.978.168.421,19	4.035.132.985.960
Kalteng	1.808.428.563.533,88	101.860.687.133,84	170.018.429.725,00	804.192.671.049,87	2.884.500.351.443
Kalsel	3.568.805.677.568,03	141.125.376.772,50	183.651.622.936,41	1.567.950.781.000,42	5.461.533.458.277
Kaltim	5.927.888.130.351,16	170.961.505.289,28	313.591.149.808,89	1.725.741.563.031,84	8.138.182.348.481
Kalut	497.315.427.235,15	31.510.075.476,02	55.906.558.135,58	333.122.336.045,51	917.854.396.892
Sulut	1.582.107.785.066,00	263.437.971.214,82	76.480.926.777,00	347.809.332.510,65	2.269.836.015.568
Sulteng	1.168.773.050.943,91	171.895.557.918,19	38.518.548.623,00	905.286.050.482,29	2.284.473.207.967
Sulsel	5.265.861.908.541,40	463.809.618.692,30	350.423.657.920,44	2.145.148.217.575,14	8.225.243.402.729
Sultra	928.036.067.488,00	98.950.535.595,91	131.177.888.269,00	619.170.585.988,03	1.777.335.077.341
Gorontalo	475.543.500.710,00	49.101.420.799,50	26.460.503.842,00	398.607.468.035,53	949.712.893.387
Sulbar	350.519.449.856,58	84.535.772.616,70	22.977.703.558,50	260.878.205.132,25	718.911.131.164
Maluku	537.008.362.576,74	182.498.002.754,23	250.000.000,00	293.660.519.513,26	1.013.416.884.844
Malut	389.261.894.406,81	98.651.314.477,00	3.343.185.908,53	350.041.953.219,04	841.298.348.011
Papua	1.305.619.167.572,87	184.715.257.421,25	44.447.705.615,00	855.208.638.498,99	2.389.990.769.108
Papua Barat	497.630.567.375,48	45.586.313.771,00	20.695.225.111,10	373.499.500.647,46	937.411.606.905

Tabel Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Provinsi	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah
Aceh	1.902.766.331.387,00	247.088.891.915,00	288.767.829.419,00	3.111.027.445.095,00	5.549.650.497.816
Sumut	8.184.619.841.030,00	433.205.914.200,00	751.443.837.096,00	1.943.135.805.043,00	11.312.405.397.369
Sumbar	2.605.188.622.691,00	193.179.696.696,00	257.647.504.952,00	1.370.427.347.152,00	4.426.443.171.491
Riau	4.402.479.144.565,00	152.778.295.833,00	311.636.454.741,00	1.309.399.634.477,00	6.176.293.529.616
Jambi	1.853.482.129.288,00	104.623.953.457,00	121.493.558.305,00	869.572.255.787,00	2.949.171.896.837
Sumsel	4.722.406.026.524,00	143.773.915.035,00	241.372.854.478,00	1.538.139.093.395,00	6.645.691.889.432
Bengkulu	827.103.194.314,00	32.222.838.637,00	31.756.528.833,00	636.737.600.421,00	1.527.820.162.205
Lampung	3.599.404.046.990,00	108.439.335.092,00	100.700.586.796,00	1.277.645.934.053,00	5.086.189.902.931
Kep. Bangka	1.171.671.148.780,00	71.208.176.036,00	36.106.991.577,00	355.958.265.302,00	1.634.944.581.695
Kep. Riau	2.832.326.132.625,00	131.216.446.693,00	38.716.911.546,00	465.222.684.287,00	3.467.482.175.151
DKI Jakarta	40.298.122.505.326,00	587.384.031.230,00	619.456.466.460,00	4.202.437.000.786,00	45.707.400.003.802
Jabar	3.954.577.841.912,00	1.131.125.755.819,00	776.357.091.051,00	8.288.848.439.292,00	44.150.909.128.074
Jateng	17.592.388.190.593,00	966.866.197.377,00	1.090.516.116.899,00	8.998.271.082.657,00	28.648.041.587.526
D.I.Y	3.211.460.676.906,00	225.544.902.965,00	203.227.016.604,00	1.102.279.260.955,00	4.742.511.857.430
Jatim	25.484.476.327.389,00	1.586.781.434.025,00	983.831.252.150,00	11.289.584.317.309,00	39.344.673.330.873
Banten	13.407.830.542.933,00	344.364.606.689,00	176.074.489.045,00	1.834.751.181.516,00	15.763.020.820.183
Bali	9.743.448.019.426,00	456.654.781.387,00	519.921.527.903,00	1.585.549.054.821,00	12.305.573.383.537
NTB	2.004.860.760.681,00	169.149.799.115,00	135.271.012.972,00	1.288.730.867.734,00	3.598.012.440.502
NTT	1.397.794.025.494,00	273.832.966.887,00	225.538.171.693,00	946.907.293.531,00	2.844.072.457.605

Kalbar	2.863.602.498.082,00	150.247.592.951,00	190.750.391.485,00	975.310.508.989,00	\ 4.179.910.991.507
Kalteng	1.970.568.890.240,00	132.093.598.337,00	184.706.320.636,00	924.740.059.408,00	3.212.108.868.621
Kalsel	3.579.977.263.711,00	172.782.477.286,00	93.858.701.992,00	1.803.423.628.654,00	5.650.042.071.643
Kaltim	6.414.513.279.040,00	190.842.448.960,00	624.303.743.478,00	2.307.971.549.738,00	9.537.631.021.216
Kalut	551.406.273.880,00	29.849.790.641,00	53.091.519.685,00	422.826.932.522,00	1.057.174.516.728
Sulut	1.659.348.594.861,00	262.452.980.705,00	97.321.579.180,00	361.235.963.235,00	2.380.359.117.981
Sulteng	1.271.722.581.085,00	225.647.592.813,00	41.360.323.294,00	936.856.533.307,00	2.475.587.030.499
Sulse	5.734.300.248.172,00	474.629.215.911,00	344.177.796.787,00	2.220.897.859.650,00	8.774.005.120.520
Sultra	1.140.646.687.552,00	120.887.592.238,00	154.741.054.579,00	647.062.854.618,00	2.063.338.188.987
Gorontalo	536.950.220.928,00	73.032.581.636,00	33.760.125.177,00	403.566.414.912,00	1.047.309.342.653
Sulbar	377.715.295.843,00	93.210.294.975,00	26.551.596.689,00	276.096.363.528,00	773.573.551.035
Maluku	561.930.238.795,00	201.609.523.685,00	0,00	281.665.474.282,00	1.045.205.236.762
Malut	476.074.158.894,00	108.177.831.044,00	1.206.784.356,00	404.800.135.053,00	990.258.909.347
Papua	2.047.834.200.175,00	149.058.760.691,00	79.826.450.093,00	1.219.781.640.945,00	3.496.501.051.904
Papua Barat	555.206.151.304,00	46.482.437.692,00	41.373.128.107,00	453.179.512.363,00	1.096.241.229.466

Lampiran 4

Tabel PDRB Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019

Tabel PDRB Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016

<b>Provinsi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aceh	113.490.000.000.000	112.666.000.000.000	116.374.000.000.000
Sumatera Utara	419.573.000.000.000	440.956.000.000.000	463.775.000.000.000
Sumatera Bara	133.490.000.000.000	140.719.000.000.000	148.134.000.000.000
Riau	447.987.000.000.000	448.992.000.000.000	458.769.000.000.000
Jambi	119.991.000.000.000	125.037.000.000.000	130.501.000.000.000
Sumatera Selatan	243.298.000.000.000	254.045.000.000.000	266.857.000.000.000
Bengkulu	36.207.000.000.000	38.066.000.000.000	40.077.000.000.000
Lampung	189.797.000.000.000	199.537.000.000.000	209.794.000.000.000
Kepulauan Bangka Belitung	44.159.000.000.000	45.962.000.000.000	47.848.000.000.000
Kepulauan Riau	146.325.000.000.000	155.131.000.000.000	162.853.000.000.000
DKI Jakarta	1.373.389.000.000.000	1.454.564.000.000.000	1.539.917.000.000.000
Jawa Barat	1.149.216.000.000.000	1.207.232.000.000.000	1.275.619.000.000.000
Jawa Tengah	764.959.000.000.000	806.765.000.000.000	849.099.000.000.000
D.I. Yogyakarta	79.536.000.000.000	83.474.000.000.000	87.686.000.000.000
Jawa Timur	1.262.684.000.000.000	1.331.376.000.000.000	1.405.564.000.000.000
Banten	349.351.000.000.000	368.377.000.000.000	387.835.000.000.000
Bali	121.788.000.000.000	129.127.000.000.000	137.296.000.000.000
Nusa Tenggara Barat	73.373.000.000.000	89.338.000.000.000	94.524.000.000.000

Nusa Tenggara Timur	54.108.000.000.000	56.771.000.000.000	59.678.000.000.000
Kalimantan Barat	107.115.000.000.000	112.347.000.000.000	118.183.000.000.000
Kalimantan Tengah	73.725.000.000.000	78.891.000.000.000	83.900.000.000.000
Kalimantan Selatan	106.779.000.000.000	110.863.000.000.000	115.774.000.000.000
Kalimantan Timur	446.029.000.000.000	440.676.000.000.000	439.004.000.000.000
Kalimantan Utara	47.696.000.000.000	49.316.000.000.000	51.065.000.000.000
Sulawesi Utara	66.361.000.000.000	70.425.000.000.000	74.765.000.000.000
Sulawesi Tengah	71.678.000.000.000	82.787.000.000.000	91.015.000.000.000
Sulawesi Selatan	233.988.000.000.000	250.803.000.000.000	269.401.000.000.000
Sulawesi Tenggara	68.292.000.000.000	72.993.000.000.000	77.746.000.000.000
Gorontalo	20.776.000.000.000	22.069.000.000.000	23.507.000.000.000
Sulawesi Barat	24.196.000.000.000	25.964.000.000.000	27.525.000.000.000
Maluku	23.568.000.000.000	24.859.000.000.000	26.284.000.000.000
Maluku Utara	19.209.000.000.000	20.380.000.000.000	21.557.000.000.000
Papua	121.391.000.000.000	130.312.000.000.000	142.225.000.000.000
Papua Barat	50.260.000.000.000	52.346.000.000.000	54.711.000.000.000

Tabel PDRB Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019

<b>Provinsi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aceh	121.241.000.000.000	126.824.000.000.000	132.087.000.000.000
Sumatera Utara	487.531.000.000.000	512.766.000.000.000	539.527.000.000.000
Sumatera Bara	155.984.000.000.000	164.034.000.000.000	172.321.000.000.000
Riau	470.984.000.000.000	482.158.000.000.000	495.846.000.000.000
Jambi	136.502.000.000.000	142.968.000.000.000	149.265.000.000.000
Sumatera Selatan	281.571.000.000.000	298.570.000.000.000	315.623.000.000.000
Bengkulu	42.074.000.000.000	44.171.000.000.000	46.362.000.000.000
Lampung	220.626.000.000.000	232.208.000.000.000	244.437.000.000.000
Kepulauan Bangka Belitung	49.985.000.000.000	52.215.000.000.000	53.951.000.000.000
Kepulauan Riau	166.082.000.000.000	173.684.000.000.000	182.184.000.000.000
DKI Jakarta	1.635.359.000.000.000	1.736.291.000.000.000	1.838.501.000.000.000
Jawa Barat	1.343.662.000.000.000	1.419.689.000.000.000	1.491.706.000.000.000
Jawa Tengah	893.750.000.000.000	941.164.000.000.000	992.106.000.000.000
D.I. Yogyakarta	92.300.000.000.000	98.024.000.000.000	104.490.000.000.000
Jawa Timur	1.482.300.000.000.000	1.563.769.000.000.000	1.650.143.000.000.000
Banten	410.137.000.000.000	434.015.000.000.000	458.023.000.000.000
Bali	144.933.000.000.000	154.110.000.000.000	162.784.000.000.000
Nusa Tenggara Barat	94.608.000.000.000	90.391.000.000.000	94.015.000.000.000
Nusa Tenggara Timur	62.725.000.000.000	65.945.000.000.000	69.372.000.000.000
Kalimantan Barat	124.289.000.000.000	130.589.000.000.000	137.121.000.000.000
Kalimantan Tengah	89.545.000.000.000	94.601.000.000.000	100.429.000.000.000
Kalimantan Selatan	121.859.000.000.000	128.093.000.000.000	133.318.000.000.000

Kalimantan Timur	452.742.000.000.000	464.823.000.000.000	486.977.000.000.000
Kalimantan Utara	54.537.000.000.000	57.837.000.000.000	61.835.000.000.000
Sulawesi Utara	79.484.000.000.000	84.258.000.000.000	89.028.000.000.000
Sulawesi Tengah	97.475.000.000.000	103.593.000.000.000	111.003.000.000.000
Sulawesi Selatan	288.814.000.000.000	309.202.000.000.000	330.605.000.000.000
Sulawesi Tenggara	83.002.000.000.000	88.329.000.000.000	94.078.000.000.000
Gorontalo	25.090.000.000.000	26.721.000.000.000	28.433.000.000.000
Sulawesi Barat	29.282.000.000.000	31.111.000.000.000	32.874.000.000.000
Maluku	27.814.000.000.000	29.467.000.000.000	31.109.000.000.000
Maluku Utara	23.211.000.000.000	25.050.000.000.000	26.586.000.000.000
Papua	148.818.000.000.000	159.790.000.000.000	134.678.000.000.000
Papua Barat	56.908.000.000.000	60.464.000.000.000	62.071.000.000.000



## Lampiran 5

## Hasil Output SPSS 23

## 1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			158
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		00000
	Std. Deviation		,24728923
Most Extreme Differences	Absolute		,091
	Positive		,064
	Negative		-,091
Test Statistic			,091
Asymp. Sig. (2-tailed)			3 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,141 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,132
		Upper Bound	,150

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

## 2. Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,677	,469		5,708	0		
Inpad@1	,520	,050	,574	10,491	0	,807	1,239
Insilpa@1	,117	,030	,213	3,884	0	,802	1,246
Inlw@1	,269	,031	,432	8,549	0	,947	1,055
Inpe@1	,016	,085	,010	,193	,847	,992	18

a. Dependent Variable: Inbm@1

## 3. Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,794 <sup>a</sup>	,631	,621	,25050	,631	65,294	4	153	0	2,064

a. Predictors: (Constant), Inpe@1, Inpad@1, Inlw@1, Insilpa@1

b. Dependent Variable: Inbm@1

## 4. Uji Heteroskedastisitas

## Correlations

			AbsRes5	Inpad@ 1	Insilpa@ 1	Inlw@1	Inpe@1
Spear man's rho	Abs Res 5	Correlation Coefficient	10	-,117	-,096	-,077	-,096
		Sig. (2- tailed)	.	,144	,229	,333	,229
		N	158	158	158	158	158
Inpa d@ 1	Correlation Coefficient	10	-,117	10	2	2	2
		Sig. (2- tailed)	,144	.	,979	,980	,979
		N	158	169	158	169	158
Insil pa @1	Correlation Coefficient	-,010	-,010	,440**	-,037	,128	-,037
		Sig. (2- tailed)	,900	0	,642	,096	,642
		N	158	169	158	169	158
Inlw @1	Correlation Coefficient	-,077	-,077	2	,056	10	,056
		Sig. (2- tailed)	,333	,980	,488	.	,488
		N	158	169	158	169	158
Inpe @1	Correlation Coefficient	-,096	-,096	2	10	,056	10
		Sig. (2- tailed)	,229	,979	.	,488	.
		N	158	158	158	158	158

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 5. Uji F-Statistik

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	16,389	4	4,097	65,294	0 <sup>b</sup>
Residual	9,601	153	,063		
Total	25,990	157			

a. Dependent Variable: lnbm@1

b. Predictors: (Constant), lnpe@1, lnpad@1, lnlw@1, lnslpa@1

6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,794 <sup>a</sup>	,631	,621	,25050	,631	65,294	4	153	0	2,064

a. Predictors: (Constant), lnpe@1, lnpad@1, lnlw@1, lnslpa@1

b. Dependent Variable: lnbm@1

## 7. Uji Statistik T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,677	,469		5,708	0		
Inpad@1	,520	,050	,574	10,491	0	,807	1,239
Insilpa@1	,117	,030	,213	3,884	0	,802	1,246
Inlw@1	,269	,031	,432	8,549	0	,947	1,055
Inpe@1	,016	,085	,010	,193	,847	,992	18

a. Dependent Variable: Inbm@1

## Lampiran 6

## Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap : Yosi Apriliyana
2. Tempat Tanggal Lahir : Sragen. 21 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Alamat Rumah : Ngadirejo Rt. 02, Mojokerto, Kedawung,  
Sragen
8. No. HP : 085732178758
9. Email : yosiap79@gmail.com
10. Nama Ayah : Alm. Slamet Widodo
11. Nama Ibu : Jumi Lestari
12. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi Mojokerto 3
  - b. SD Negeri Mojokerto 3
  - c. SMP Negeri 1 Kedawung
  - d. SMK Negeri 1 Sragen
  - e. IAIN Surakarta

## Lampiran 7

## Bukti Cek Plagiarisme

## Skripsi

## ORIGINALITY REPORT

**30%**  
SIMILARITY INDEX

**32%**  
INTERNET SOURCES

**19%**  
PUBLICATIONS

**17%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.uny.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>jurnal.unsil.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>anzdoc.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>